



ACCESS Tahap II


Laporan Enam Bulanan

November 2009 - Maret 2010

www.access-indo.or.id
ACCESS

Disclaimer

Laporan ini menjelaskan tentang layanan yang dilakukan oleh IDSS Pty Ltd dan tim ACCESS Tahap II sesuai dengan Ruang Lingkup Jasa yang telah disepakati dalam kontrak 45746 antara IDSS Pty Ltd dan AusAID. Laporan ini disusun atas nama dan untuk penggunaan eksklusif AusAID seperti yang diperlukan dalam perencanaan yang sedang berlangsung dan keperluan pelaksanaan. Laporan ini ditujukan dan diterbitkan sehubungan dengan, ketentuan-ketentuan perjanjian antara IDSS Pty Ltd dan AusAID. IDSS Pty Ltd tidak bertanggung jawab apapun atas penggunaan atau kepercayaan pada laporan ini dengan pihak ketiga. Isi laporan ini, dan rekomendasi yang dibuat, dapat digunakan untuk keperluan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Program.

PENGAWASAN DOKUMEN						
						
No. Rev	Tanggal	Detail Revisi	Pengarang	QA	Disetujui	
0	31/03/10	Dokumen akhir untuk pengajuan	NJF	ST	PGB	

IDSS

Level 12, 60 Albert Road
South Melbourne, VIC, 3205
AUSTRALIA
Tel: 61 3 8683 1457
Fax: 61 3 8683 1599

ACCESS Tahap II

Jl. Bet Ngandang 1, No.1 xx
Sanur, 80033
Bali
INDONESIA
Tel: 62 361 288 428
Fax: 62 361 287 509

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	1
1 Kata Pengantar	7
2 Tujuan Program	10
2.1 Ringkasan Tujuan	10
2.2 Pencapaian terhadap Tujuan	10
2.2.1 Tujuan 1.....	10
2.2.2 Tujuan 2.....	13
2.2.3 Tujuan 3.....	14
2.2.4 Tujuan 4.....	21
3 Kemajuan Pelaksanaan terhadap Lima Daerah Fungsional.....	24
3.1 Area Fungsional 1: Menyediakan Sumber Daya dan Mengelola Program.....	24
3.2 Area Fungsional 2: Interaksi aktif dengan CS dan Pemerintah berdasarkan nilai-nilai/prinsip bersama.	25
3.3 Area Fungsional 3: Membangun kapasitas institusi lokal.....	27
3.4 Area Fungsional 4: Mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan mandiri	30
3.5 Area Fungsional 5: Mengembangkan pembelajaran berkelanjutan, perubahan kebijakan dan pelaksanaan baik secara internal maupun external	31
4 Pengawasan, Evaluasi dan Pembelajaran	32
4.1 Pengawasan dan Evaluasi	32
4.2 Pembelajaran yang dipelajari Berasal dari Pelaksanaan Program	33
5 Keberlanjutan.....	34
6 Isu-Isu yang Bersinggungan	34
6.1 Kesetaraan Gender	34
6.2 Lingkungan.....	35
6.3 Anti-Korupsi.....	36
6.4 Kemitraan	37
7 Manajemen Resiko	38
8 Manajemen Program	40
8.1 Program Staf	40
8.2 Manajemen Dana Hibah.....	41
8.2.1 Proses Hibah	41
8.2.2 Pengeluaran Hibah.....	42

Daftar Tabel

Tabel 1: Komitmen dari berbagai kepentingan stakeholder untuk melaksanakan rencana aksi.....	16
Tabel 2: Pencapaian Dana Pemerintah oleh ACCESS di Pengembangan Kapasitas (CB) di Bantaeng	17
Tabel 3: Pencapaian Dana Pemerintah untuk Pembangunan Desa di Bantaeng	18
Tabel 4: Catatan Tugas yang diberikan	27
Tabel 5: Kegiatan yang dilakukan oleh Pengembangan Kapasitas (CB) ACCESS dan Mitra Strategis	28
Tabel 7: Risiko yang teridentifikasi dari bulan Nov 2009-Maret 2010	38

Daftar Gambar

Gambar 1: Struktur dan Kerangka ACCESS	9
Gambar 2: Pengolahan Hibah pada Periode Pelaporan ini	41
Gambar 3: Pengolahan Hibah sampai sekarang	41
Gambar 4: Dana Dialokasikan terhadap Anggaran	43

Lampiran

Lampiran 1: Daftar Istilah	1
Lampiran 2: Kemajuan Pengawasan Matrix	1
Lampiran 3: Perkiraan Pendanaan enam Bulanan.....	1
Lampiran 4: Dokumen yang dihasilkan pada Periode Pelaporan ini	1
Lampiran 5: PGAs (Project Grant Agreement) dikeluarkan pada periode pelaporan ini	1

Singkatan dan Akronim

ACCESS	Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme Phase II (Pengembangan <i>Alokasi Dana Desa</i> (Village Budget Allocation)
ADD	
AI	Appreciative Inquiry (Apresiasi Pemeriksaan)
AIPD	Australian Indonesian Partnership for Decentralisation (Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi)
AIP-MNH	Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi)
ANTARA	Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy (Bantuan Australia-Nusa Tenggara untuk Otonomi Daerah)
APBD	District Income and Expenditure Budget (<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>)
APBN	National Income and Expenditure Budget (<i>Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional</i>)
APY	Annual Plan Year (Rencana Tahunan per Tahun)
AUD	Australian Dollar (Mata uang Australia)
AusAID	Australian Agency for International Development (Badan Pembangunan Internasional Australia)
BaKTI	Eastern Indonesia Learning Exchange (<i>Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia</i>)
Bappeda	Regional Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
Bappenas	Ministry of National Development Planning (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)
BASICS	Better Approaches to Service Provision through Increased Capacities in Sulawesi (Pendekatan yang lebih baik untuk Penyediaan Pelayanan melalui Peningkatan Kapasitas di Sulawesi)
BPM	<i>Badan Pemberdayaan Masyarakat</i> (Community Empowerment Body)
BPMPD	<i>Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</i> (Community and Government Empowerment Body)
BUMDes	<i>Badan Usaha Milik Desa</i> (Village Owned Enterprises)
CAHHF	China-Australia Integrated Health and HIV/AIDs Facility (Kesehatan terpadu Cina-Australia dan Fasilitas HIV/AIDs)
CB	Capacity Building (Pengembangan Kapasitas)
CBO	Community-based Organisation (Organisasi Berbasis Masyarakat)
CDST	Community Development Snapshot (Potret Pengembangan Masyarakat)
CE	Community Engagement (Interaksi Masyarakat)
CIDA	Canadian International Development Agency (Pengembangan lembaga Internasional Canada)
CLAPP	Community Led Action Participatory Process (Komunitas Led Proses Aksi secara partisipatif)
CLM	Coordination and Learning Meeting (Rapat Koordinasi dan Pembelajaran)

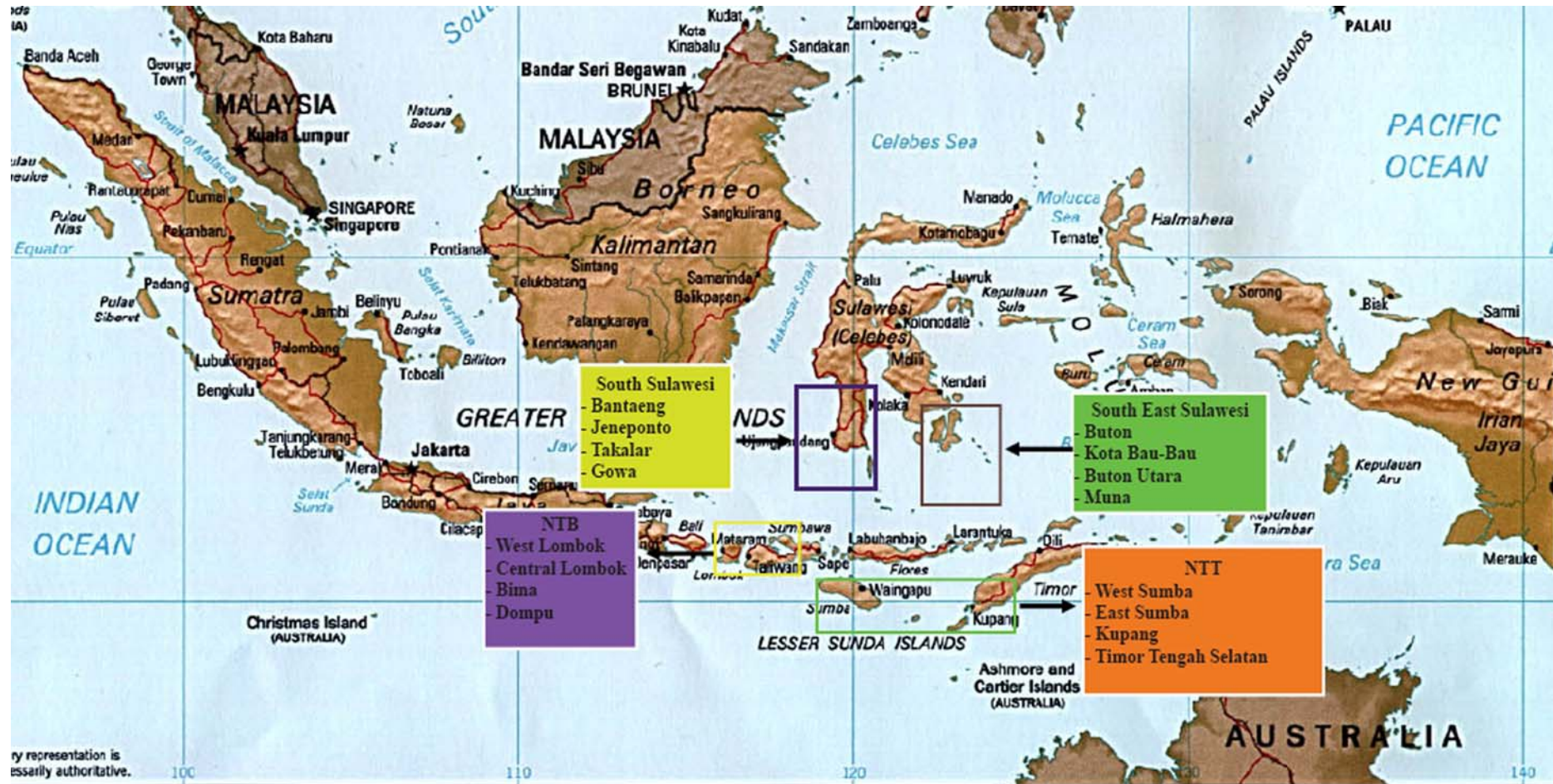
CPS	Country Program Strategy(Program Strategi Pedesaan)
CS	Civil Society (Masyarakat Sipil)
CSI	Civil Society Index (Indeks Masyarakat Sipil)
OMS	Civil Society Organisation (Organisasi Masyarakat Sipil)
PAK	District Citizen Engagement Plan (Rencana Interaksi Warga Kabupaten)
DPRD	<i>Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i> (Local Legislative Council)
FLA	District Stakeholder Committee (Komite Stakeholder Kabupaten)
EMP	Environmental Management Plan (Rencana Manajemen Lingkungan)
<i>Forum KTI</i>	<i>Forum Kawasan Timor Indonesia</i> (Eastern Indonesia Forum)
FMM	Field Management Manual (Petunjuk Manajemen Lapangan)
GAC	Governance Anti-Corruption (Pemerintahan Anti-Korupsi)
GOA	Government of Australia (Pemerintah Australia)
GOI	Government of the Republic of Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia)
GPI	Gender and Poverty Inclusion (Inklusi Gender dan Kemiskinan)
GSI	Gender and Social Inclusion (Gender dan Sosial (Inklusi))
IPR	An Independent Progress Review (Kajian Kemajuan Independen)
IAFCP	Indonesia Australia Forest Carbon Partnership (Kemitraan Indonesia Australia Karbon Hutan)
JICA	Japan International Cooperation Agency (Badan Kerjasama Internasional Jepang)
<i>Kabupaten</i>	District
<i>Korprov</i>	<i>Koordinator Provinsi</i> (Provincial Coordinator)
KPM	<i>Kader Pengembangan Masyarakat</i> (Community Development Cadre)
LDG	Local Democratic Governance (Pemerintah Demokratis Lokal)
LGSP	Local Governance Support Project (Dukungan Proyek Pemerintah Lokal)
M&E	Monitoring and Evaluation (Pengawasan dan Evaluasi)
MEL	Monitoring, Evaluation and Learning (Pengawasan, Evaluasi dan Pembelajaran)
MIS	Management Information System (Sistem Informasi Manajemen)
MOHA	Ministry of Home Affairs (Menteri Dalam Negeri)
MRG	Monitoring Review Group (Kajian Pengawasan Kelompok)
Musrenbang	<i>Musyawarah Perencanaan Pembangunan</i> (Development Planning Process)
NGO	Non-Governmental Organisation (Organisasi Non Pemerintah)
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
ODI	Overseas Development Institute (Institut

ODST	(Pengembangan Luar Negeri) Organisational Development Snapshot Tool (Alat Potret Pengembangan Organisasi)
OH&S	Occupational Health and Safety (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
OM	Outcome Mapping (Hasil Pemetaan)
OMST	Outcome Mapping Snapshot Tool (Hasil Pemetaan Alat Potret)
Oxfam GB	Oxfam Great Britain
P2K	<i>Program Pengembangan Kecamatan</i> (Sub-District Development Program)
P2SPP	<i>Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif</i>
P3B	Pro-Poor Planning and Budgeting (Perencanaan dan Penganggaran Pro-Miskin)
PABAM	<i>Pendidikan Alternatif Anak dan Masyarakat</i> (Alternative Learning for Children and Adults)
PAK	Pertemuan Apresiatif Kabupaten
PAMELS	Participatory Monitoring, Evaluation and Learning System (Pengawasan, Evaluasi dan Sistem Pembelajaran secara Partisipatif)
PC	Program Coordinator (Program Koordinator)
PCC	Program Coordination Committee (Komite Koordinasi Program)
PD	Program Director (Direktur Program)
PDD	Project Design Document (Dokumen Desain Proyek)
<i>Pemda</i>	<i>Pemerintah Daerah</i> (District Government)
PGA	Project Grant Agreement (Perjanjian Proyek Hibah)
PKK	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</i> (Family Empowerment and Prosperity)
PMD	<i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i> (Village and Community Empowerment) – Directorate General within Ministry of Home Affairs
PNPM	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat</i> (National Community Empowerment Program)
PNPM-MP	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan</i>
PO	Program Officer (Petugas Program)
Rp.	Rupiah (Mata Uang Indonesia)
RPJMDes	<i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa</i> (Village Mid-Term Development Plan)
SBA	Strength-based Approach (Pendekatan Berbasis Kekuatan)
SKPD	<i>Satuan Kerja Perangkat Daerah</i> (Technical Units within each district)
SOS	Scope of Services (Ruang Lingkup Pelayanan)
SS	Support Services (Dukungan Pelayanan)
STA	Short Term Advisor (Penasihat Jangka Pendek)
STO	Senior Technical Officer (Petugas Teknis Senior)
TA	Technical Assistance (Bantuan Teknis)
TAT	Technical Advisory Team (Tim Penasihat Teknis)
TOF	Training of Facilitators (Pelatihan Fasilitator)
TOR	Terms of Reference (Kerangka Acuan)
TOT	Training of Trainers (Pelatihan bagi Pelatih)
TTS	<i>Timor Tengah Selatan</i>

UNDP

United Nations Development Programme

ACCESS Tahap II Lokasi Program



Ringkasan Eksekutif

Selama pelaporan periode November 2009 sampai dengan Maret 2010, Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS)¹ Tahap II memiliki pencapaian utama sebagai berikut:

- **Pemerintah Australia (GOA) dan Pemerintah Indonesia (GOI) menentukan bahwa ACCESS berkinerja baik.**

Tim Kajian Kemajuan Independen (IPR) dilakukan pada bulan Januari 2010². Tim IPR menyimpulkan bahwa "ACCESS dilaksanakan sesuai dengan Desain dan Ruang Lingkup Layanan AusAID, termasuk penggunaan pendekatan tertentu. Pelaksananya ditempatkan secara luas sesuai jalurnya, dengan bukti bahwa empat tujuan program tercapai. Selanjutnya, tim IPR mencatat bukti yang timbul sebagaimana yang ditetapkan dalam tujuan utama. Catatan khusus dari komitmen bersama dibagikan diantara mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), perwakilan Pemerintah Daerah, anggota masyarakat dan tim pelaksana. Rasa 'kepemilikan' yang jelas dikembangkan di antara para stakeholder yang bisa menjadi elemen kunci bagi program yang berkesinambungan. Tim IPR memiliki pandangan bahwa program ini terpadu dan dapat berkontribusi secara signifikan pada strategi AusAID yang lebih luas,"³.

Menteri Dalam Negeri (MOHA) melalui Direktur Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyampaikan apresiasi kinerja yang dilakukan oleh ACCESS dengan mendukung permintaan dari dua kabupaten baru, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah, untuk mereplikasi penyatuan proses perencanaan yang secara luas di kabupaten, telah dilakukan di wilayah kerja ACCESS di Sumba. Yang termasuk di dalam replikasi ini adalah memastikan hubungan perencanaan diantara tingkat atas dan tingkat bawah dengan semua stakeholders yang terkait. Perencanaan awal di 140 desa dan kelurahan di dua kabupaten baru akan dibahas di tingkat kecamatan dan kabupaten. ACCESS telah menyampaikan permintaan secara resmi kepada AusAID untuk mendukung replikasi dan AusAID saat ini sedang mencari sumber-sumber alternatif.

PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) juga menyampaikan apresiasi dan dukungan atas kinerja yang ACCESS lakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendukung gerakan di tingkat provinsi pada pembangunan desa yang terintegrasi, 'Gerakan Pembangunan Desa Terpadu' (GERDUBANGDES), dan khususnya melalui gerakan GERDU CERDAS yang mencoba untuk berbagi praktik cerdas di berbagai sektor melalui forum desa.

AusAID mengakui ACCESS sebagai praktek yang terbaik di dalam Peraturan Terhadap Penyimpangan yang memicu permintaan kepada Program untuk berkontribusi pada studi yang dilakukan oleh Pemerintahan AusAID dan Unit Anti-Korupsi (GAC) sebagai kontribusi atas kinerja U4⁴ pada korupsi di tingkat

¹ Untuk kemudahan dalam membaca 'ACCESS Tahap II' akan disebutkan 'ACCESS'

² Tim IPR termasuk empat evaluator yang terdiri dari tiga konsultan independen (spesialisasi M & E, spesialisasi pemerintahan lokal, spesialisasi partisipasi masyarakat) dan perwakilan AusAID dan juga perwakilan MOHA

³ Crawford, Suhirman, Ebbinghaus, van Hooft 2010 "Independent Progress Review Draft Report" p.6.

⁴ The U4 Anti-Korupsi Resource Centre donor membantu praktisi di lebih efektif mengatasi tantangan korupsi melalui dukungan pembangunan mereka. U4 melayani delapan badan-badan pembangunan: Norad (Norwegia), DFID (Inggris), CIDA (Kanada), GTZ (Jerman), MinBuZa (Belanda), Sida (Swedia), BTC (Belgia) dan AusAID (Australia) dengan menyediakan sumber daya dan pelayanan-pelayanan.

LSM. ACCESS menyediakan garis besar praktik-praktik yang ada dan tantangan yang terjadi dalam mencegah penipuan dan yang melibatkan masyarakat sipil (CS).

- **ACCESS meningkatkan profil AusAID dan programnya di tingkat Internasional.**

ACCESS dengan sangat berhati-hati menargetkan pembangunan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi pembicara Internasional tentang topik tata pemerintahan dengan mengambil bagian dalam konferensi, evaluasi dan penelitian. Hal ini menjadikan peluang untuk meningkatkan profil AusAID dan Program-programnya dan menyoroti komitmen AusAID, dan prakteknya, menyediakan ruang untuk inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan pendekatan pembangunan dan metodologi-metodologi yang lebih efektif.

Selama Periode Pelaporan ACCESS:

- Menulis dokumen dan memfasilitasi lokakarya pada konferensi World Appreciative Inquiry (AI) di Nepal dengan tema 'Penguatan Tata Pemerintahan Daerah yang Demokrasi - Bagaimana Appreciative Inquiry dan Pendekatan Berbasis Aset Membawa Warga dan Pemerintah bersama-sama di dalam Pembicaraan tentang hal tersebut'.
 - Tulisan di dalam dua publikasi UNDP:
 - 'Menilai Responsif Gender Pengembangan Kapasitas Lokal di Indonesia', bersama (UNDP) - publikasi SNV.
 - 'Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah: alat Praktis dari Indonesia', publikasi bersama Bappenas - UNDP.
- **AusAID semakin tertarik pada beberapa pendekatan dalam desain ACCESS yang saat ini sedang dilaksanakan.**

AusAID semakin menunjukkan minat dalam menambah basis pengetahuan dan berbagi pengalaman mengenai metodologi dan pendekatan yang inovatif yang diterapkan di ACCESS. Sejumlah inovasi ini termasuk Hasil Pemetaan (OM) dan Pendekatan berbasis kekuatan (SBA) yang terhubung ke dalam desain ACCESS yang berpendapat bahwa 'pendekatan perkembangan sistemik' untuk meningkatkan tata pemerintahan melalui perubahan perilaku dan pemberdayaan atas aset yang tersedia dan kekuatan di kabupaten.

AusAID Jakarta menaruh perhatian pada OM dan menyelenggarakan pelatihan OM untuk staf mereka, yang telah dilakukan oleh STA ACCESS pada OM, Steff Deprez. Secara umum, pengakuan dan perhatian pada pendekatan SBA sebagai dasar pengembangan diri dan yang berkelanjutan juga tampak pada AusAID. AusAID meminta bantuan Chris Dureau, STA ACCESS untuk SBA, untuk membantu mereka mempersiapkan lokakarya pengembangan kapasitas yang menampilkan SBA di Papua Nugini (PNG), yang akan diselenggarakan pada bulan April. Dokumen tender AusAID PNG untuk program pemerintahan yang demokratis. *Stongim Pipol Strongim Nesen*, juga sangat tertarik pada desain SBA yang menyoroti sejauh mana AusAID melakukan pendekatan terhadap pembangunan.

- **Para Donor dan stakeholder pembangunan lainnya mempertimbangkan pendekatan ACCESS**

Sejumlah donor dan Organisasi Internasional non-pemerintah (LSM) telah menunjukkan minat dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan ACCESS, metodologi-metodologi dan alat-alat dan sejumlah pengalaman dan pembelajaran telah dilakukan untuk meningkatkan serapan. Sebagai contoh:

- Sebuah kelompok sekitar 40 orang dari Proyek UNDP “Mendukung untuk Memperkuat Kapasitas dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemulihan Masyarakat di Aceh dan Nias” mengunjungi kegiatan-kegiatan ACCESS di Lombok.
- Dalam lokakarya tahunan VSO yang dihadiri oleh organisasi-organisasi mitra (LSM Lokal dan pemerintah) dan relawan pembangunan Internasional, staf ACCESS menyampaikan ‘Gender dan pendekatan Sosial Inklusif dalam Pembangunan Daerah’ dan salah satu mitra ACCESS (Yayasan Mitra Turatea) melakukan presentasi tentang ‘Jurnalistik warga sebagai Jalan untuk Mengawasi Program-program Pembangunan’.

Beberapa organisasi dan program lain, mengadaptasi proses pembelajaran dan *good practices* ACCESS, beberapa diantaranya adalah:

- Burnet Institut saat ini menggunakan Rencana Resiko Manajemen dan Rencana Peraturan terhadap Penyimpangan ACCESS untuk memperbarui rencana yang didanai oleh AusAID, China-Australia berkerjasama dalam program Fasilitas Kesehatan dan dan HIV/AIDs (CAHHF).
 - The Indonesia Australia Forest Carbon Partnership (IAFCP) Facility telah menggunakan ACCESS’ *Fraud Control Plan*.
 - YAPPIKA dan Asia Foundation telah mengadaptasi Perangkat Pemantauan Partisipatif Pengembangan Kapasitas (ODST) ACCESS dan menggunakannya untuk penilaian mitra mereka.
 - ACCESS telah diundang untuk berkontribusi berbagi pengalaman dalam menerapkan OM di Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) yang menyelenggarakan tiga hari ‘Training Pengenalan Outcome Mapping’ pada bulan April 2010.
- **Pemerintah Indonesia (GOI) mengakui bahwa ACCESS berkontribusi untuk mengisi ruang yang kosong dalam perencanaan dan penganggaran desa, serta memperkaya prosedur pemerintah termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).**

ACCESS dan mitra-mitranya telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam merancang proses partisipatif dalam upaya mempersatukan perencanaan dan penganggaran dari tingkat desa ke tingkat yang lebih tinggi agar sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah. Pengakuan untuk rencana tersebut ditunjukkan pada contoh berikut:

- Dalam pertemuan baru-baru ini antara Bappenas-Menteri Dalam Negeri-Menkokesra dan AusAID, Direktur Penanggulangan Kemiskinan di bawah Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM di Bappenas, mengakui bahwa kontribusi ACCESS terkait dengan penyatuan perencanaan. Pertemuan lanjutan pada akhir Maret membahas tiga program, Program Pengembangan Sistem Pembangunan Pasrtisipatif (P2SPP), Perencanaan dan Penganggaran Pro-kaum Miskin (P3B) dan ACCESS, dan kontribusi yang potensial untuk meningkatkan PNPM. Program-program ini diharapkan bisa memperkenalkan *Good Practises* dalam mendukung perkembangan proyek percobaan yang mendukung PNPM.
- Setelah keberhasilan ACCESS dalam usaha menyatukan perencanaan seperti yang disebutkan di atas, Bappenas saat ini berencana untuk mengirim timnya ke Lombok dengan dukungan dari ACCESS untuk mempelajari upaya Pemerintah local dalam melakukan pendekatan untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran desa dari PNPM) - Mandiri Pedesaan (MP) dan P2SPP dengan proses yang ada di pemerintah.

- Pengakuan juga datang dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal bekerjasama dengan 'Koalisi HAK' yang mengundang Direktur Program ACCESS untuk menyampaikan presentasi tentang 'Pendanaan dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang baik di wilayah – sebuah Perspektif Donor Program'.
 - Dua Kabupaten Program ACCESS, Jeneponto dan Bantaeng, yang sebelumnya memaparkan pengalaman mereka dalam pembangunan daerah secara luas mulai dari tingkat desa ke tingkat yang lebih tinggi, diundang ke '*Rapat Koordinasi Gerbang Kampung Kesra (Gerakan Nasional Pembangunan Kampung) 2010* yang terpilih sebagai lokasi untuk Proyek *Pandu Gerbang Kampung*⁵. Proyek ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten dan akan mencoba menerapkan integrasi yang lebih baik dari tiga kelompok nasional pengentasan kemiskinan⁶ yang berbeda untuk menjadi pendekatan tunggal.
 - ACCESS masih berinteraksi secara intensif dengan kordinator PNPM serta dengan PNPM Mandiri Pendukung Fasilitas (PSF) dan fokus pada upaya untuk menjamin penyatuan proses perencanaan dan penganggaran. Ada pengakuan secara luas yang memperlihatkan praktek yang baik bahwa ada manfaat yang sama bagi warga dan juga pemerintah Daerah. Senior Spesialis Pengembangan Sosial PSF, Victor Bottini, baru-baru ini menyatakan “*ada nilai penting dalam banyak contoh-contoh yang baik dan membuat rencana yang mungkin untuk mengintegrasikan perencanaan partisipatif menurut PNPM dengan musrenbang tanpa menjadi 'kaku' atau memaksa semua lokasi untuk mengikuti pola yang sama persis dan berakhir tanpa instruksi yang jelas atau kita kembali seperti masa hampir 30 tahun yang hanya memberikan janji tanpa ada peningkatan pelayanan atau respon kepada ekspresi kebutuhan masyarakat/penduduk*”.⁷ ACCESS saat ini telah menugaskan sebuah studi di Sumba Timur untuk melihat pelaksanaan, dan pendanaan untuk RPJMDes – Rencana Pembangunan Desa jangka menengah. Sebuah film pendek yang sedang dibuat untuk mendokumentasikan partisipasi warga negara dan perubahan yang terjadi dari upaya ini.
- **Pemerintah Propinsi dan Kabupaten melakukan pendekatan *scaling-up* secara efektif yang sudah terbukti untuk mencapai peningkatan hasil-hasil pembangunan dengan menggunakan RPJMDes dan memastikan target yang tepat untuk program dengan meningkatkan fokus pada orang miskin dalam pengalokasian dana.**
Pemerintah daerah menyadari pentingnya pengaruh fasilitator yang baik, yang dapat mendukung usaha-usaha pembangunan di semua tingkatan (desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi). Pendekatan ACCESS, fokus pada pengembangan kapasitas (CB) untuk fasilitator dan memperlihatkan contoh-contoh perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan pengembangan program yang partisipatif untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi dan pemerintah lokal dengan meningkatkan alokasi dana pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk pengembangan RPJMDes dan pelaksanaan program yang teridentifikasi.

⁵ Beberapa kontroversi dari beberapa proyek baru ini seperti yang diprakarsai oleh Deputi Menteri II di Menkokesra dan tampaknya tidak dalam koordinasi dengan upaya pengentasan kemiskinan lainnya termasuk PNPM (di bawah Pak Sujana) dan upaya-upaya dari TKPK-RI. tampaknya sebuah diskusi internal di Menkokesra dipicu dan tidak jelas apakah proyek tersebut akan dilanjutkan.

⁶ Ketiga kelompok tersebut termasuk 1) Program berbasis bantuan dan perlindungan sosial (social security) 2) Program berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Community empowerment program – PNPM) 3) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro (small bussiness and micro credit)

Pada laporan ini ada beberapa contoh:

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyediakan anggaran untuk mereplikasi pendekatan CB ACCESS pada pelatihan kader di tingkat desa dan kecamatan untuk mendukung program provinsi pada pengentasan kemiskinan '*Baruga Sayang*' dengan fokus pada perubahan paradigma pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah provinsi akan memberikan dukungan pada tujuh kabupaten lainnya..
 - Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), empat Pemerintah Daerah di pulau Flores⁷ bekerjasama dengan VSO merencanakan melakukan kunjungan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran ke wilayah kerja ACCESS di Sulawesi Selatan yaitu di kabupaten Jeneponto dan Bantaeng untuk mempelajari bagaimana pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) bekerjasama untuk memberikan bantuan yang lebih efektif melalui pentargetan yang tepat pada program kemiskinan dengan menggunakan penilaian kemiskinan dan pemetaan sosial ekonomi yang partisipatif.
 - Sebuah studi yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didanai melalui dana Hibah Inovatif ACCESS sedang digunakan oleh beberapa Pemerintah Daerah untuk mengembangkan atau mempertajam kebijakan-kebijakan mereka pada BUMDes. Baru-baru ini Pemerintah Daerah dari Sumba dan Timor mengunjungi beberapa BUMdes Lombok yang ditonjolkan dalam studi.
- **ACCESS dan mitra OMS semakin dikenali oleh pemerintah provinsi sebagai stakeholder yang baik yang memberikan kontribusi dari sisi permintaan dan penawaran pada pemerintahan demokratis yang lebih baik dan peningkatan pemberian pelayanan.**
 - Di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) program ini menyampaikan 'Praktik yang baik - Perencanaan dan Penganggaran dengan menggunakan Metodologi berbasis Aset' dalam rapat koordinasi propinsi untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah dan Desa (BPMPD) perwakilan dari semua kabupaten di NTT, yang menghasilkan sebuah 'Dokumen Rekomendasi tingkat Propinsi untuk Perencanaan dan Penganggaran yang partisipatif'. Yang menegaskan perlunya mengembangkan rencana aksi untuk bekerja pada masalah ini melalui kerjasama Provinsi NTT dan Pemerintah Daerah, PNPM-MP, ACCESS (Goa), Bengkel APPEeK, Yayasan Bahtera, Yayasan Cendana Mekar, Yayasan Wali Ati dan LSM⁸ lainnya yang peduli dengan masalah ini. Kolaborasi ini akan difokuskan pada berbagi pendanaan dan mengoptimalkan sumber daya manusia untuk pelatihan.
 - Menindaklanjuti pertemuan di Kupang, ACCESS diminta untuk berkontribusi dalam "Pelatihan Fasilitator yang ahli pada perencanaan dan pendanaan yang partisipatif" untuk fasilitator provinsi dari departemen pemerintah yang berbeda-beda di provinsi yang akan berperan sebagai pendukung sistem untuk pemerintah kabupaten.
 - **Pemerintah Kabupaten telah berkomitmen untuk mendanai pelaksanaan sejumlah rencana aksi dari mitra OMS, yang dihasilkan dari lokakarya Pertemuan Apresiatif Kabupaten (PAK)**

Di semua wilayah kerja ACCESS di tingkat kabupaten, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat pada proses ACCESS dan telah mengalokasikan anggaran untuk memastikan bahwa OMS lokal bekerja sama dengan Pemerintah Daerah pada isu yang teridentifikasi selama lokakarya PAK. Sejumlah komitmen anggaran ini telah dimasukkan dalam Kesepakatan

⁷ Kabupaten Ngada, Nagekeo, Sikka dan Ende

⁸ LSM ini adalah partner ACCESS di Sumba atau Timor

kerjasama antara Pemerintah Daerah dan ACCESS. Selama periode ini, tujuh rencana aksi baru telah ditandatangani dengan kontribusi rata-rata 36% dari total anggaran Pemerintah Daerah terhadap rencana aksi.

- **Managemen ACCESS dalam pemberian program dana hibah sesuai rencana.**

Selama periode pelaporan ini, 43 Perjanjian Proyek Dana Hibah (PGA) telah diterbitkan. Sampai saat ini ACCESS telah menerbitkan 109 PGA dengan 37% dari total anggaran dana hibah sudah dianggarkan dan lebih dari 61% anggaran sudah dialokasikan. Perjanjian ACCESS 'dengan Mitra sudah mencakupi mitra OMS yang bekerja di 324 desa dan dengan lebih dari 287 organisasi berbasis masyarakat (CBO) aktif dalam pemberian pelayanan publik, pembangunan ekonomi lokal, perencanaan dan penganggaran desa dan pengelolaan sumber daya alam. Selama periode ini 430 orang (207 perempuan dan 223 laki-laki) dilatih sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat di desa dalam proses perencanaan dan penganggaran.

1 Kata Pengantar

Dua dokumen strategis terakhir dari AusAID semakin mempengaruhi konteks program untuk ACCESS, yaitu:

- i) Perjanjian Tingkat Sub National di Indonesia - Sebuah Kerangka untuk AusAID tahun 2010 - 2015; dan
- ii) Strategi Penyampaian Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD).

Dokumen-dokumen ini menyoroti arah strategis, prinsip-prinsip dan tiga pilar strategi penyampaian untuk AusAID, dan mengakui perlunya bekerja pada kedua sisi permintaan dan penawaran dan memastikan pembagian pengetahuan yang efektif sebagai alat untuk belajar dari pengalaman untuk meningkatkan dampak-dampak pembangunan yang positif.

ACCESS ditempatkan dalam posisi yang baik untuk berkontribusi secara signifikan pada Program Bantuan Australia pada umumnya, dan khususnya pada hasil AIPD (Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi), karena Program ini memenuhi mandat penguatan warga (khususnya kaum perempuan, kaum miskin dan kelompok marjinal) dan organisasi mereka yang berinteraksi dengan Pemerintah Daerah dalam proses tata pemerintahan demokratis lokal yang berfokus pada pelayanan yang lebih baik.

Temuan dari misi IPR baru-baru ini menyoroti potensi ACCESS untuk memperkaya arah baru Program AusAID Indonesia. Pada hubungan pemenuhan-permintaan, misalnya, tim IPR mencatat bahwa "Program telah merintis kolaborasi antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah Daerah melalui komitmen" dan bahwa ada kenyataan dari "hubungan yang kuat dan saling menghormati antara Mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah Daerah". Tim IPR berpendapat bahwa "... Program ini sesuai dengan strategi AusAID yang lebih luas dan akan memberikan kontribusi secara signifikan."⁹

Struktur Program dan kerangka kerja strategis digambarkan dalam Gambar 1. ACCESS berfokus pada:

- Target yang tepat pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan perencanaan dan penganggaran dari desa ke tingkat kabupaten;
- Menguatkan kader desa untuk memperbaiki pelayanan sarana publik dengan meningkatkan perencanaan dan penganggaran dan meningkatkan mekanisme umpan balik;
- Pengelolaan sumber daya alam yang partisipatif untuk tata kelola sumber daya alam dan hutan yang lebih baik.
- Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan mata pencaharian dan meningkatkan pendapatan melalui Koperasi dan Usaha Unit Desa; dan
- Keadilan sosial untuk memastikan bahwa masyarakat, khususnya perempuan, kaum miskin dan kelompok marjinal lainnya, sadar akan hak-hak mereka dan memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan.

⁹ Crawford, Suhirman, Ebbinghaus, van Hooff, 2010 "Laporan Konsep Kajian Kemajuan Independen " hal.6

Laporan ini menguraikan tentang perkembangan yang berlangsung selama lima bulan terakhir untuk periode¹⁰ November 2009 sampai Maret 2010 terhadap Tujuan Program dan lima bidang fungsional yang ditentukan di bawah yang ditentukan berdasar Ruang Lingkup Pelayanan.

¹⁰ AusAID and ACCESS agreed to adjust reporting period from the previous November-April schedule to a November-March (in the future October – March and April – September) schedule to ensure it coincides with the Annual Plan schedule. This will enable readers of the Annual Plan to benefit from the learning and receive an update on the latest progress reporting

Gambar 1: Struktur dan Kerangka ACCESS



2 Tujuan Program

2.1 Ringkasan Tujuan

ACCESS bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap Tata pemerintahan yang demokratis di 16 kabupaten di Indonesia dengan fokus pada penguatan civil society dan engagement dengan Pemerintah Daerah. Program ini bertujuan untuk berkontribusi melalui tujuan sebagai berikut:

1. Mitra OMS menggunakan nilai yang mendorong partisipasi dan pendekatan-pendekatan inklusif untuk memperkuat kapasitas dan kepercayaan warga pada pemerintahan lokal yang demokratis.
2. Mitra OMS secara teratur berkolaborasi satu sama lain untuk meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.
3. Mitra OMS secara rutin berinteraksi dengan pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan desa untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan pelayanan pro-kaum miskin.
4. Program-program pemerintah dan donor mempertimbangkan pembelajaran yang dipelajari dan praktik yang baik dari ACCESS.

2.2 Pencapaian terhadap Tujuan

Bagian berikut menjelaskan kemajuan terhadap tujuan Program selama periode pelaporan November 2009-Maret 2010.

2.2.1 Tujuan 1

Mitra OMS menggunakan nilai yang mendorong partisipatif dan pendekatan-pendekatan inklusif untuk memperkuat kapasitas dan kepercayaan warga bagi pemerintahan lokal yang demokratis.

ACCESS terus membuat kemajuan yang baik dalam mencapai Tujuan 1. Laporan konsep terbaru IPR mencatat bahwa "pendekatan berbasis nilai" telah memberikan kerangka pemersatu bagi para stakeholder untuk memandu reformasi tata pemerintahan lokal yang demokratis. Menariknya, nilai-nilai menjadi lebih dari retorika sehingga memberikan dasar praktis untuk perubahan perilaku yang diperlukan untuk mencapai agenda reformasi. Para stakeholder program didorong untuk menyesuaikan perilaku mereka sendiri dengan nilai-nilai yang dianut sebelum mengharapkan perubahan dalam masyarakat sasaran mereka. Banyak Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan perwakilan LSM yang diwawancarai menekankan pentingnya proses perubahan sosial yang dimulai dari perilaku mereka sendiri."¹¹

Selama lima bulan terakhir, tujuh rencana aksi baru¹² telah ditandatangani dari jumlah total proyek yang sedang dilaksanakan menjadi 22. Proyek-proyek ini, berdasarkan visi PAK, **terfokus pada aktor**, yaitu mereka berfokus pada perubahan perilaku Mitra ACCESS dan masyarakat yang mereka melayani serta dalam institusi

¹¹ Crawford, Suhirman, Ebbinghaus, van Hooft 2010 "Laporan Konsep Kajian Kemajuan Independen" hal.7

¹² Sebuah rencana aksi perjanjian antara OMS lokal dan ACCESS untuk melaksanakan suatu proyek tertentu, yang mungkin juga dibiayai bersama oleh para stakeholder. Proyek ini adalah di luar agenda/tematik teknis yang ditentukan bersama sebagai bagian dari PAK. Proyek-proyek yang termasuk dalam lima tematis utama; perencanaan dan penganggaran, pengembangan ekonomi lokal pengelolaan sumber daya alam, peningkatan pelayanan publik, dan keadilan sosial. Rencana tindakan lebih lanjut dikembangkan oleh OMS dengan masy. melalui proses penilaian dan perencanaan yang didanai oleh ACCESS. Setelah sukses penilaian rencana aksi yang didanai oleh ACCESS melalui proyek perjanjian hibah (PGA) menetapkan dasar kontrak untuk pekerjaan yg akan dilakukan oleh OMS tsb. Kebanyakan PGAs unt jangka waktu 24, 3-6 bulan.

termasuk Pemerintah Daerah yang paling mempengaruhi komunitas-komunitas di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

“Saya menyadari bahwa di masa lalu wanita tidak dimasukkan dalam proses perencanaan apalagi terlibat dalam proses pengambilan keputusan tapi saya mengambil apa yang telah saya pelajari dari ACCESS melihat ke desa saya di Oel Bubu, dan menemukan bahwa perempuan di desa saya ternyata lebih handal daripada saya dalam berkontribusi untuk keberhasilan kegiatan desa kami. Karenanya saya percaya untuk melibatkan perempuan adalah suatu keharusan.”(Edy Taneo, Ketua Kelompok Tani, Desa Oel Bubu, Kabupaten TTS)

“Ada banyak potensi di desa kami yang dapat diserap namun belum pernah dipaparkan secara terbuka dan belum pernah mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah. Bekerja dengan ACCESS telah sangat membantu kami untuk mengidentifikasi dan memahami serta potensi kami dan sumber daya alamnya yang kami miliki di desa kami,” (Bapak Kamiruddin, Kepala Desa Pattiro, Bantaeng)

Rencana aksi yang dikembangkan adalah **gender dan sosial inklusif**; secara eksplisit menargetkan kaum miskin, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Memastikan partisipasi perempuan telah menjadi norma bagi semua Mitra dan partisipasi regular perempuan rata-rata 50%. Mitra sekarang berpacu untuk bagaimana meningkatkan kemampuan membuat keputusan para perempuan dan kaum miskin di kelompok sasaran. Sebuah studi tentang kepemimpinan perempuan yang ditugaskan oleh ACCESS telah memberikan strategi yang jelas tentang bagaimana mengidentifikasi dan memperkuat pemimpin perempuan. Staf ACCESS sedang bekerja keras untuk membantu mitra melalui partisipasi sendiri sehingga perempuan, kaum miskin, dan terpinggirkan mempunyai peran yang lebih strategis.

Rencana aksi **pemberdayaan**; dengan menempatkan perempuan dan kaum miskin pada posisi sebagai pusat dari pekerjaan mereka, Mitra, melalui CB kelompok warga lokal, adalah :

- Memfokuskan kegiatan mereka pada penciptaan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu yang dihadapi;
- Memfasilitasi penciptaan visi bersama; dan
- Membantu masyarakat untuk mengorganisir diri untuk bertindak

Pendekatan berbasis kekuatan (SBA), dan apresiasi terhadap aset lokal termasuk pengetahuan dan pengalaman lokal dan aspirasi masyarakat, merupakan inti dari proses pemberdayaan.

Rencana Aksi mempromosikan **Interaksi** – melalui kegiatan mereka dengan warga, Mitra membantu Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) untuk bertemu dengan pemerintah di semua tingkatan dan mempromosikan kepentingan dan hak-hak mereka. Pusat pelayanan masyarakat, contohnya, pendanaan sebagai bagian dari rencana aksi di Lombok, membantu warga untuk mengakses layanan publik yang menjadi hak mereka.

“Ibu Masitah selalu mengomel dan mengingatkan kita ‘Teman-teman, sekali lagi saya ingin menekankan jangan pernah mencoba menggunakan dana program di luar yang telah disepakati- bahkan untuk membeli penyegar ruangan. Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang kita berusaha untuk mempromosikannya” (Ibu Atun, Bendahara LSM pada pertemuan konsolidasi di kantor ACCESS-Lombok, 24 Desember 2009)

Rencana aksi **difokuskan pada pembelajaran** - untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka, Mitra menempatkan refleksi dan pembelajaran di jantung program mereka. ACCESS melakukan pelatihan monitoring dan evaluasi (M&E) untuk semua mitra dan Komite Stakeholder Kabupaten (FLA) di kabupaten lama untuk membantu mitra dalam merancang kerangka kerja M & E yang lebih berorientasi pada pembelajaran. Pelaporan dan pemantauan kemajuan secara rutin adalah kunci untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan mengembangkan cara yang lebih efektif untuk berinteraksi dengan mitra untuk mempromosikan perubahan yang positif dalam sistem pemerintahan.

22 rencana aksi telah dikembangkan secara **partisipatif** dan mencerminkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua rencana aksi dikembangkan dengan partisipasi kelompok-kelompok penerima manfaat, Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya. Mereka melibatkan masyarakat dalam proses refleksi dan pembelajaran. Selain itu, melalui pelatihan keuangan yang dilakukan oleh ACCESS, Mitra menjadi sadar dan berkomitmen untuk manajemen keuangan yang akuntabel dan transparan.

Di kabupaten baru, pada periode ini, delapan lokakarya PAK diselenggarakan dengan menggunakan metodologi AI dan melibatkan 252 peserta yang penuh antusias (52% perempuan dan 48% laki-laki) dari CS, pemerintah dan sektor swasta. Visi-visi di kabupaten dan agenda sektoral telah dipromosikan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan para stakeholder lainnya menggalang dukungan. Sebanyak 29 Mitra sekarang telah memiliki proposal yang telah disetujui untuk melakukan penilaian secara partisipatif untuk mengembangkan teknik rencana aksi. Penilaian ini akan melibatkan sedikitnya 1.740 orang di desa-desa sasaran dan sejumlah petugas dari pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pada Tujuan 1:

Penekanan yang berkelanjutan pada pendekatan berbasis nilai yang dipraktekkan. Tim IPR menyatakan bahwa salah satu ciri terkuat ACCESS adalah cara nilai-nilai dasar yang dipromosikan pada Program, khususnya yang berkaitan dengan Gender dan Inklusif Sosial (GSI) dan pemerintahan yang demokratis, sudah diinternalisasi oleh para stakeholder di semua tingkat dan jelas memberikan kontribusi untuk beberapa dampak yang dimaksudkan. Tim IPR memperhatikan bahwa pendekatan berbasis nilai sebenarnya terbukti menjadi cara yang efektif, efisien dan berkelanjutan untuk mempengaruhi perilaku Mitra ACCESS serta penerima manfaat utama¹³. Arti ACCESS sepenuhnya dimengerti dan diterapkan oleh staff ACCESS dan dipromosikan secara efektif kepada Mitra.

Pengakuan yang meningkat dari Mitra akan manfaat SBA sebagai cara yang efektif yang memberikan inspirasi untuk bekerja pada isu-isu kunci. Meskipun tidak menyangkal bahwa ada 'masalah' yang harus diselesaikan, SBA menyediakan sarana untuk berfokus pada kekuatan dalam diri sendiri, daripada menunggu orang lain untuk datang dan memecahkan masalah.

¹³ Crawford, Suhirman, Ebbinghaus, van Hooft 2010 "Konsep Laporan IPR" pp.6-7.

“Kita bisa meraih impian kita semua meinggalkan pikiran memilah-milah satu dengan yang lain dan tidak mementingkan diri sendiri tapi bahu membahu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jika kita berpikir positif kita bisa menciptakan Kupang sejahtera bagi masyarakat kita”
(Fr. Lenny, Kupang dalam pertemuan FLA)

Mitra Strategis menghargai dan menggunakan pendekatan berbasis nilai. Dalam interaksinya dengan mitra lokal, Mitra Strategis menggunakan bahasa dan penekanan yang sama pada nilai-nilai. Ini memberikan pesan yang konsisten untuk Mitra bahwa nilai-nilai ini bukan merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ACCESS, tetapi nilai-nilai demokrasi universal.

2.2.2 Tujuan 2

Mitra OMS secara teratur berkolaborasi satu sama lain untuk meningkatkan tata pemerintahan yang demokratis di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.

Secara keseluruhan, Mitra ACCESS membuat kemajuan menuju pencapaian Tujuan 2. Meskipun ada variasi yang luas antara Mitra di bidang kolaborasi, hal ini dianggap normal untuk tahap ini dalam proses. Mitra menggunakan kesempatan seperti kajian PAK, pertemuan FLA, kegiatan-kegiatan CB dan forum lain untuk membahas isu-isu sangat penting dan strategis. Staf ACCESS di tingkat propinsi menggunakan kesempatan ini untuk mendorong Mitra untuk bekerja sama. Mitra di kabupaten lama terus bekerja sama dalam pelaksanaan rencana aksi mereka. Mitra Strategis berpengalaman di bidang pengembangan jaringan dan membantu Mitra ACCESS untuk membangun aliansi untuk tindakan bersama.

Ada juga pemahaman yang semakin tumbuh diantara semua mitra ACCESS tentang kebutuhan untuk mendorong tindakan kolaboratif di tingkat masyarakat. Pemahaman ini sedang diwujudkan ke dalam tindakan di kebanyakan kabupaten. Misalnya, di Sumba, beberapa OMS berkolaborasi dalam studi mengenai pelaksanaan RPJMDes untuk mengetahui sejauh mana rencana desa telah dilakukan dan oleh siapa. Hal ini bisa menjadikan aksi untuk melobi pemerintah legislatif untuk menerima rencana-rencana di pedesaan oleh semua pihak.

Di Buton, Prima telah menyelenggarakan *Kelompok Marjinal Orang Tua Murid* dan kelompok-kelompok ini mulai berkolaborasi secara bersama-sama pada isu-isu kualitas pendidikan yang lebih baik. Khususnya, asosiasi ini, yang memiliki 27 cabang, akan bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam Komite Sekolah di desa masing-masing.

Empat OMS di Buton Utara menciptakan *Forum Pengembangan Partisipasi Warga* untuk bekerja pada isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan secara partisipatif. Forum ini akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa seluruh 49 desa di Buton Utara memiliki RPJMDes secara partisipatif pada akhir tahun 2011 dan dasar hukum (Perda atau SK Bupati) untuk menggunakan rencana tersebut sebagai dasar bagi semua program dan pendanaan termasuk Alokasi Dana Desa (ADD), PNPM, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Upaya-upaya ini sejalan dengan Permendagri No 66/2007 tentang Perencanaan dan Penganggaran.

Perwakilan fasilitator dari 17 desa di Jeneponto bekerja sama untuk mempengaruhi Bupati untuk menggunakan peta sosial desa dan RPJMDes dalam perencanaan

mereka. Mereka menyelenggarakan pameran peta sosial desa dan ringkasan dari RPJMDes dan meyakinkan Bupati tentang nilainya sebagai acuan untuk semua program pemerintah. Bupati menginstruksikan SKPD untuk menggunakan dokumen ini sebagai dasar perencanaan. Pameran ini ditindaklanjuti dengan pertemuan individu dengan seluruh divisi perencanaan SKPD. Hasil dari pertemuan tersebut adalah apresiasi yang penuh antusias dari kegunaan peta dan perencanaan serta komitmen untuk menggunakannya dalam perencanaan dan pelaksanaan di masa depan.

Di Lombok, dialog Forum Lintas Desa (FLD) diadakan untuk menggambarkan bagaimana empat Pusat Pengaduan Masyarakat bisa mempromosikan layanan publik yang lebih baik dalam komunitas mereka dan bagaimana memperkenalkan praktek mereka untuk 13 komunitas lain yang sedang menciptakan Pusat Pengaduan Masyarakat. FLD mengharapkan bahwa hubungan mereka akan berkembang untuk melibatkan semua 17 Pusat Pengaduan dan menjadikan tuntutan untuk berinteraksi dengan pemerintah tentang kualitas pelayanan publik.

Di Jeneponto, sembilan kelompok produksi ekonomi (yang melibatkan 770 anggota di antaranya 582 perempuan) telah bergabung dalam asosiasi untuk mempromosikan pembangunan ekonomi mereka sendiri, berbagi informasi dan pengetahuan, mencari peluang pemasaran bersama dan melobi pemerintah untuk meningkatkan dukungan.

Di kabupaten baru, telah bertambah jumlah kolaborasinya diantara OMS dalam merancang rencana aksi. Kertas gagasan diajukan dari Bima dan Dompu, dan dari kabupaten TTS dan Kupang, menunjukkan banyaknya organisasi yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam rencana aksi. Misalnya, di Bima LP2DER bekerja dengan tiga OMS lainnya, dan LESPEL di Dompu bekerja sama dengan lima OMS lain yang bekerja pada isu peningkatan layanan publik.

Lokakarya PAK dan promosi berikutnya dari visi dan agenda juga memberikan kesempatan bagi OMS untuk bekerja sama.

Faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan dalam mencapai Tujuan 2 meliputi:

Desain PAK mendorong OMS lokal untuk berpikir tentang isu-isu lokal dan mengembangkan visi bersama. Promosi ini memberikan saling pengertian dan menghargai dalam meningkatkan dan mendukung satu sama lain dan berkolaborasi daripada persaingan.

Contoh yang ditetapkan oleh Mitra Strategis dalam berkolaborasi dan berbagi pembelajaran dalam mengambil perspektif bersama terhadap Pengembangan Kapasitas (CB) membangun kepercayaan Mitra Lokal yang dapat merasakan nilai dari kolaborasi dan juga berbagi pembelajaran dengan pasangan mereka yakni Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) dan kelompok masyarakat.

Kesempatan yang terstruktur untuk refleksi dan pembelajaran dimasukkan dalam semua kegiatan dan rencana aksi, dan hal ini kondusif untuk mengembangkan OMS yang umum dan menyadari perlunya tindakan bersama.

2.2.3 Tujuan 3

Mitra OMS secara rutin berinteraksi dengan pemerintahan di kabupaten, kecamatan dan desa untuk meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan pelayanan pro-miskin.

ACCESS terus membuat kemajuan yang signifikan dalam mempromosikan interaksi Mitra dengan Pemerintah Daerah. Di kabupaten-kabupaten baru pejabat Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Mitra ACCESS membahas tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana PAK kabupaten secara luas, yang telah dipasarkan kepada pemerintah, donor, dan OMS lainnya. Di kabupaten Dompu dan Bima misalnya forum FLA multi-stakeholder telah aktif mempromosikan rencana ini pada berbagai tingkatan termasuk ke SKPD, DPRD, OMS lokal dan partai politik. Respon dari kelompok ini positif dan diskusi terhadap alokasi sumber daya dan tindak lanjut dilanjutkan.

Sebagai contoh, di Kota Bau-Bau, Kepala Bappeda, Drs. Sudjiton, MM. menghargai upaya PAK sebagai kontribusi terhadap penyusunan rencana pembangunan kota jangka panjang yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Di Buton Utara, pemerintah kabupaten telah secara resmi berkomitmen menyediakan Rp.500,000,000 untuk Tahun Anggaran (TA) 2010 untuk pelatihan fasilitator, penilaian kemiskinan secara partisipatif, pengembangan peta desa sosio-ekonomi, dan proses pengembangan RPJMDes. Ini merupakan investasi rata-rata 20 juta rupiah per desa, yang akan mencakup biaya pelatihan pejabat kecamatan dan kabupaten untuk berinteraksi dalam proses dan memastikan pelaksanaannya pada tingkat yang lebih tinggi.

Di Dompu, pemerintah (melalui Bappeda) akan mengalokasikan dana sebesar Rp. 150,000,000, untuk mendukung perencanaan dan penganggaran untuk satu kecamatan, dengan harapan, bahwa jika dianggap berguna, pada TA 2011, semua kecamatan akan disertakan. Komitmen dari aktor non-pemerintah juga ikut ambil bagian dalam lokakarya multi-stakeholder meskipun tanpa pendanaan dari ACCESS. Misalnya, PIKUL, salah satu LSM besar di Kabupaten Kupang, akan mengembangkan sebuah rencana aksi berdasarkan agenda dan akan mencari dana diluar ACCESS. Rencana Kabupaten berguna dalam berbagai cara, misalnya, Bappeda di Kupang akan mengintegrasikan agenda PAK ke dalam RPJMDes mendatang sedangkan di Dompu dan Bima, pejabat Pemerintah Daerah (anggota FLA) membantu FLA dalam pertemuan dengan DPRD tentang PAK dan agenda. DPRD menjadi antusias dan mendukung inisiatif dan telah menjanjikan dana untuk beberapa kegiatan.

Kontribusi-kontribusi dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam PGA dan sebagaimana disebutkan dalam laporan sebelumnya bahwa kegiatan tersebut sedang diwujudkan. Lebih dari 4,5 miliar rupiah telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung rencana aksi di masing-masing kabupaten sampai saat ini.

Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam mendukung rencana aksi Mitra periode pelaporan ini diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Komitmen dari stakeholder yang berbeda untuk mengimplementasikan rencana aksi

Judul Proyek	PGA	Total Anggaran (Rp)	Total Kontribusi (Rp)			
			ACCESS	Pemerintah Daerah	Komunitas/ Pempdes	Mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Pemberdayaan masyarakat Desa dalam pengelolaan Program pembangunan sebagai titik temu untuk kemandirian Desa di Buton - Pelintas	3 years	2.350.245.000	1.196.995.000	689.000.000	240.745.000	223.505.000
Internalisasi prinsip-prinsip pemerintahan lokal yang demokratis di NRM berkelanjutan dan pengembangan ekonomi desa setempat berdasarkan aset lokal di Buton – Sintesa	2.5 tahun	1.373.795.000	732.500.000	393.695.000	116.500.000	131.100.000
Meningkatkan kapasitas fasilitator desa dan kader kesehatan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam gaya hidup bersih sebagai bagian dari LDG - Berugak Dese	2.5 tahun	965.160.000	380.532.500	506.487.500	30.700.000	47.440.000
Mempercepat legalitas pengelolaan hutan masyarakat di Mareje Bonga melalui NRM berkelanjutan yang demokratis dan meningkatkan kehidupan masyarakat-Asosiasi Mareje Bonga	2 tahun	718.215.000	614.360.000	5.800.000	2.625.000	95.430.000
Memperkuat akses dan kendali CS melalui advokasi berbasis masyarakat NRM di Lombok Barat - KONSEPSI	2.25 tahun	943.665.000	708.565.000	3.600.000	42.100.000	189.400.000

Judul Proyek	PGA	Total Anggaran (Rp)	Total Kontribusi (Rp)			
			ACCESS	Pemerintah Daerah	Komunitas/ Pemdes	Mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Pemberdayaan warga untuk LDG melalui perencanaan secara partisipatif dan penganggaran di Sumba Timur - Yasalti	2.5 tahun	1.126.963.000	849.890.000	153.198.000	90.437.500	33.437.500
NRM yang berkelanjutan berfokus pada masyarakat miskin dan perempuan di Sumba Barat - PAKTA Sumba	2 tahun	953.464.500	726.107.500	136.760.000	57.697.000	32.900.000
TOTAL		8.431.507.500	5.208.950.000	1.888.540.500	580.804.500	753.212.500

*Ragam masyarakat dan kontribusi dana desa

Memanfaatkan anggaran Pemerintah Daerah tidak hanya terjadi melalui kontribusi terhadap proyek-proyek OMS. Bahkan yang lebih mengesankan sejumlah uang telah dialokasikan untuk membangun fondasi yang telah dibina melalui kerja sama antara Mitra ACCESS, ACCESS sendiri dan Pemerintah Daerah. Contoh, Kabupaten Bantaeng merupakan kasus yang menarik - pada tahun 2009 Jaringan, Mitra ACCESS dan BPMD Bantaeng bekerja sama dalam program CB untuk mendukung peraturan daerah tentang BUMDes. Di seluruh 46 desa di Bantaeng beberapa orang dilatih sesuai dengan fungsinya dalam BUMDes (manajer BUMDes mendapatkan pelatihan dalam perencanaan dan manajemen, akuntan BUMDes dan kasir menerima pelatihan dalam masalah-masalah keuangan dll) untuk memastikan bahwa orang yang terlibat di dalam BUMDes memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola uang dalam jumlah besar. Pada awal tahun 2010 kekuatan pemerintah lokal dinilai dengan munculnya BUMDes dan setelah memastikan bahwa semua berada pada tempatnya sesuai undang-undang daerah, mereka mengalokasikan 100 juta rupiah per BUMDes untuk tahun 2010. Hal ini direncanakan karena beberapa proyek dari beberapa SKPD yang berbeda mungkin menggunakan mekanisme BUMDes untuk memastikan kesinambungan management berdasarkan masukan-masukan pemerintah.

Tabel 2 di bawah ini menyoroti bagaimana investasi awal dalam kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dapat memberikan pengaruh hingga sepuluh kali lipat dari investasi awal.

Table 1: Dana Pemerintah yang digunakan (Government Funds Leveraged) oleh ACCESS di CB di kabupaten Bantaeng

BUMDes	Aktivitas	Investasi ACCESS (Rp.)	Pemerintah Daerah Bantaeng
2009	Pengembangan Kapasitas	367,355,000	360,000,000
	Sumber Modal	0	0
2010	Pengembangan Kapasitas	200,000,000	495,000,000
	Sumber Modal	0	4,600,000,000
	Total	567,355,000	5,455,000,000

Pada tabel berikut memperlihatkan jangka waktu investasi dalam membangun kapasitas manusia dalam perencanaan dan penganggaran desa sehingga penggunaan dana yang diarahkan langsung ke desa dapat dioptimalkan. Pada tahun 2009 ACCESS bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dukungan CB untuk para fasilitator (desa, kecamatan dan kabupaten) dalam perencanaan dan penganggaran yang di danai bersama. Memiliki sumber daya manusia yang terampil memungkinkan Pemerintah daerah untuk meningkatkan dana ke desa (misalnya ADD), tetapi juga melalui SKPD. Program-program lainnya seperti PNPM menyadari bahwa RPJMDes dapat diandalkan dan fasilitator desa yang terlatih membantu mereka mengoptimalkan investasi mereka sendiri dan di sejumlah kabupaten tindakan kolaboratif direncanakan dengan PNPM sesuai dengan pedoman penggabungan sistem perencanaan.

Tabel 3 memberikan gambaran investasi ACCESS serta pendanaan lainnya terhadap pembangunan desa.

Tabel 3: Pengaruh Dana Pemerintah untuk Pengembangan Desa di Bantaeng

Rencana Desa	Aktivitas	ACCESS	Pemerintah Daerah Bantaeng
2009	Pengembangan Kapasitas	634,800,000	540,000,000
	ADD (70% untuk inisiatif-inisiatif pembangunan)	0	6,000,000,000
2010	Pengembangan Kapasitas	350,000,000	400,000,000
	ADD (70% untuk inisiatif-inisiatif pembangunan)	0	7,000,000,000
	Total	984,800,000	13,940,000,000

ACCESS tidak menghubungkan alokasi dana ADD atau alokasi dana lain dari adanya Program tersebut, namun angka-angka ini menggambarkan bahwa investasi kecil di CB memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dana pembangunan lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) atau sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain contoh di atas, memiliki RPJMDes dan sumber daya manusia yang dapat membantu mengatur program pembangunan yang adil juga akan membuat investasi lain menjadi lebih efektif. Ini termasuk PNPM yang memiliki anggaran (dana nasional dan lokal) untuk alokasi PNPM-MP (Pedesaan) dari 18 miliar rupiah dan untuk PNPM-MK (Perkotaan) sebesar 4.8 miliar rupiah.

Mitra OMS telah menggunakan cara-cara yang inovatif dan profokatif untuk mempengaruhi SKPD dan telah berhasil dalam mendapatkan dukungan program untuk pelaksanaan rencana aksi mereka. Sebagai contoh:

- BPMD di TTS memfasilitasi pertemuan dana bersama (ACCESS, PNPM, AIP-MNH) untuk mengembangkan kolaborasi dan sinergi dalam mempromosikan LDG.

- BPMD BPMD telah memberikan komitmen untuk mengembangkan pedoman untuk RPJMDes di TTS dan Kupang, berkolaborasi dengan Mitra ACCESS.
- Di Takalar sejumlah SKPD telah membuat komitmen untuk bekerja dengan lima Mitra ACCESS pada sejumlah isu-isu sektoral atau isu-isu yang berlawanan seperti pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap pelecehan dan kekerasan, partisipasi publik dalam sektor kesehatan dan praktek berkelanjutan untuk melindungi lingkungan.
- Di Kota Bau-Bau Bappeda dan SKPD telah membuat komitmen untuk bekerja dengan Mitra ACCESS dan untuk mendukung empat rencana aksi yang telah direncanakan termasuk pada akses ke sektor pendidikan dan kegiatan yang berfokus pada kesehatan reproduksi remaja.
- Mitra ACCESS dan pemerintah Bantaeng (BPM / PD) sedang melobi DPRD Bantaeng untuk mendapatkan dukungan secara berkisambungan di tahun 2010. Sejumlah dana telah dimasukkan ke dalam rancangan anggaran (Rencana Kegiatan dan Anggaran).
- Komitmen yang kuat telah diberikan oleh Bappeda, Dinas Kehutanan dan Departemen Pertanian dan DPRD pada Turbin GP3A untuk melaksanakan kegiatan dalam mendukung *Green Jeneponto* dan program Kebersihan dan anggaran masalah-masalah lingkungan.
- Departemen Kehutanan Sumba Barat telah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk rencana aksi Pakta dan bekerja pada hutan masyarakat.
- Beberapa kebijakan / peraturan telah ditandatangani untuk menjamin pelaksanaan RPJMDes dan pernyataan tegas dari Bupati, seperti:
 - Di Lombok Barat ada Surat Edaran¹⁴ untuk menggunakan Community Led Action Participatory Process (CLAPP) dan GSI dalam pengembangan

“Banyak kelompok telah dibentuk di desa-desa, tetapi aturan biasanya dibuat oleh orang lain. Tapi saya optimis dengan program ini karena peraturan BUMDes tidak jatuh dari atas, tapi benar-benar dibuat oleh masyarakat, sehingga kegiatan BUMDes dapat dikontrol oleh masyarakat” (Abdul Hafid – Kepala Desa - Desa Bonto Jai)

“Saya, atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Organisasi Masyarakat Sipil-(OMS) dan ACCESS yang telah membantu dalam pengembangan desa RPJMDes. Pada bulan februari [2010], kita akan memulai Musrenbang Kecamatan. Jika semua desa memiliki RPJMDes, hal itu akan mempermudah bagi kita semua. Kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan OMS berlanjut sampai semua desa memiliki RPJMDes. Kita dapat menempatkan dana ke dalam revisi APBD pada bulan April sehingga pada bulan Juni dana akan tersedia..”
(Drs. H. Lahibu Tuwu, M.Si, Kepala BAPPEDA Buton)

“Agenda kabupaten TTS dan Kupang akan menjadi contoh pembelajaran yang perlu dibagi kepada SKPD di kabupaten lainnya. Pada beberapa pertemuan, saya selalu berbagi dengan SKPD bahwa pendekatan pengembangan yang partisipatif oleh ACCESS benar-benar merefleksikan nilai-nilai demokratik dan mendorong tata pemerintahan lokal yang demokratis.”. (Johan Loban, BPMPD, NTT)

¹⁴ Surat Edaran No.140/170/Bappeda/2010

RPJMDes di tahun 2010.

- Di Lombok Tengah ada Surat Edaran¹⁵ sebagai pedoman teknis dalam perencanaan desa untuk RPJMDes tahun 2010- 2014.
- Bupati Jeneponto mengulangi pernyataannya menuntut/mendesak SKPD untuk memanfaatkan hasil peta sosial-ekonomi yang sebelumnya dikembangkan bersama Mitra ACCESS.
- Di Bantaeng Bupati mengeluarkan Surat Edaran¹⁶ untuk mengintegrasikan semua sistem perencanaan dalam tahun 2010. Bupati membuat pernyataan publik untuk menggunakan RPJMDes sebagai dasar untuk semua program di desa termasuk termasuk PNPM. DPRD sangat mendukung Surat Edaran Bupati tersebut dan akan bekerja pada peraturan daerah yang akan mengatur gerakan 'satu desa satu rencana'.
- Strategi-strategi sedang dibahas di Jeneponto dan Bantaeng tentang cara menggunakan RPJMDes sebagai pedoman untuk perencanaan dan penganggaran di tingkat kabupaten untuk memastikan bahwa perencanaan awal dan akhir menemukan adanya kecocokan.

Faktor-faktor yang menyumbang keberhasilan terhadap Tujuan 3 adalah:

Peluang untuk berdialog yang disediakan oleh ACCESS, seperti PAK dan kajian PAK, telah memungkinkan kepercayaan dibangun antara pemerintah dan OMS. Hal ini berkontribusi pada promosi PAK dan agenda yang dihasilkan dan mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam dan keterbukaan di antara para pejabat pemerintah dan membawa peluang yang lebih besar untuk berkolaborasi.

Program-program berkualitas tinggi yang dilakukan Mitra ACCESS juga berkontribusi membangun kepercayaan dalam hubungan dan saling menghormati antara OMS dan Pemerintah Daerah. kepercayaan ini akan menjadi aset yang besar pada saatnya OMS akan menangani masalah-masalah sulit, seperti korupsi.

Keinginan Pemerintah Daerah dalam mendukung inisiatif OMS menyarankan untuk meningkatkan kepercayaan dan penghargaan terhadap peran OMS dalam

"Sampai sekarang, ego saya berpikir mengapa kita harus memberikan dana dalam jumlah besar kepada masyarakat dan bagaimana mungkin mereka mengelola dana tersebut?Tapi sekarang saya mengerti bahwa kita harus mendukung masyarakat untuk mengelola diri sendiri dan kami harus siap mendukung kapasitas masyarakat dalam perencanaan penganggaran dan implementasi. BPMD akan bekerja sama dengan ACCESS di masa depan untuk mempersiapkan masyarakat sehingga mereka dapat membuat rencana pembangunan mereka sendiri."
Albinus Kase, BPMD Kabupaten TTS.

pembangunan daerah. Dalam perencanaan desa khususnya, ada sebuah momentum yang serupa tumbuh di antara warga dan pemerintah untuk mempergunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan melalui kebijakan dan hukum desentralisasi nasional. Hasil-hasilnya adalah mendorong keberlanjutan sebagai stakeholder yang benar-benar berinteraksi dengan satu sama lainnya di luar jangkauan dan kontrol dari Program ACCESS.

Manfaat dari **Pengembangan Kapasitas-(CB) warga** di semua tingkatan, ditujukan dengan ditingkatkannya rasa kepemilikan masyarakat dan kemauan untuk mengambil inisiatif dan memastikan pembangunan berbasis masyarakat menjadi tampak nyata oleh Pemerintah Daerah. Mereka mengakui

¹⁵ Surat Edaran No. 050/24/BPMPD/2010

¹⁶ Surat Edaran 414/./II/2010.

bahwa hal ini telah ada pada saat yang tepat saat pemerintah mencoba sistem pemerintahan di kabupaten secara luas untuk mendukung desa melakukan kerjasama dengan meningkatkan anggaran melalui ADD, PNPM dan sektoral program lainnya. Menjaga pengeluaran dana dan mengoptimalkan penggunaannya hanya bisa dipastikan jika ada sistem dan mekanisme yg sesuai seperti kapasitas lokal untuk management yang efektif di semua tingkatan.

2.2.4 Tujuan 4

Program-program pemerintah dan program donor mempertimbangkan pembelajaran dan contoh-contoh praktek yang baik dari ACCESS.

Pendekatan strategis ketiga dari ACCESS (lihat Tabel 1) membahas bagaimana program dapat memberikan kontribusi untuk bantuan pembangunan yang lebih efektif sejalan dengan [Deklarasi Paris](#) dan [Komitment Jakarta](#). ACCESS berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan dan pendekatannya dan melakukan kolaborasi, berbagi dan membuat jaringan dengan organisasi lain, lembaga, dan donor sebagai persyaratan utama untuk mencapai hal ini. Ada kemajuan yang berarti terhadap tujuan ini selama periode pelaporan.

Pada tingkat nasional, ACCESS memiliki kesempatan untuk mempresentasikan pengalaman-pengalaman ACCESS kepada Departemen Dalam Negeri pada saat lokakarya evaluasi MOHA yang diselenggarakan pada November 2009 di Jakarta dan dihadiri oleh staff PMD dan perwakilan Pemerintah Daerah dari 16 kabupaten. Pada bulan Desember 2009, ACCESS juga berkesempatan untuk mempresentasikan pengalaman-pengalaman yang berfokus pada scaling-up ke staf AusAID dan kontraktor-kontraktor pada 'Lokakarya Desentralisasi AusAID'.

Tujuan utama ACCESS adalah untuk menarik perhatian Pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten dari luar wilayah kerja ACCESS dan mendapatkan komitmen mereka untuk memastikan nilai-nilai praktek di ACCESS dibagikan ke kabupaten lain di provinsi yang sama, juga jika memungkinkan kepada provinsi-provinsi lainnya. Selama periode pelaporan, Pemerintah Daerah Wakatobi yang bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), mengunjungi Pemerintah Daerah Bantaeng dan Yajalindo, mitra ACCESS bekerjasama dengan Pemerintah Lokal, untuk mempelajari lebih banyak mengenai pendekatan CB ACCESS terkait dengan perencanaan dan penganggaran yang partisipatif. Pemerintah Lokal Jeneponto telah melakukan presentasi di forum¹⁷ nasional dan regional tentang pengalaman dan pembelajaran mengenai perencanaan dan penganggaran yang partisipatif di desa dan integrasi dengan Musrenbang. Baik pemerintah daerah Jeneponto maupun JICA, mengapresiasi bagaimana pendekatan ACCESS mengenai perencanaan yang partisipatif sangat efektif dalam menargetkan program kemiskinan, khususnya penggunaan pemetaan sosio-ekonomi di Sulawesi Tenggara, diskusi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan lembaga donor tentang bagaimana untuk saling mendukung. Sebagai contoh, di Buton Utara dan Bau-Bau, ACCESS, Canadian International Development Agency (CIDA) dan Pemerintah lokal, membahas cara untuk bekerjasama dalam memastikan peningkatan pada pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Pendekatan yang lebih baik dari CIDA untuk Penyediaan Layanan yang lebih baik melalui Program peningkatan kapasitas di Sulawesi (BASICS) didiskusikan dengan FLA dua kabupaten tersebut melalui penelitian, yang akan menghasilkan pengembangan standar pelayanan minimum.

¹⁷ This includes Bappenas Workshop on Pro-Poor Planning and Budgeting and VSO Workshop on Baseline Data and Social Economic Mapping

ACCESS juga terus berinteraksi dengan empat target pemerintah provinsi dan menyadari bahwa mereka adalah jembatan penting bagi kabupaten untuk *scaling up* dan replikasi. Sebagai hasilnya, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah berkomitmen untuk mendanai dan menjadi tuan rumah workshop di bulan Maret / April pada berbagi pembelajaran bagi Perencanaan Partisipatif dengan menggunakan CLAPP-Gender dan Inklusi Kemiskinan (GPI), di mana seluruh pemerintah kabupaten di provinsi ini diundang. Pemerintah Provinsi NTB akan meluncurkan dana stimulan sebesar Rp.1 juta per desa untuk mendukung rehabilitasi tempat pertemuan masyarakat untuk 33 desa ACCESS didukung desa-desa di Lombok Barat. Hal ini akan diumumkan pada *Malam Philantropy* Gerdu Cerdas sebagai tindak lanjut dari lokakarya 'Berbagi Praktek Baik dalam Program ACCESS yang direncanakan pada pertengahan April.

ACCESS terus memperkuat hubungan dengan **Program AusAID dan donor lainnya** melalui berbagi informasi secara rutin dan di beberapa lokasi untuk meningkatkan koordinasi. Sebagai contoh:

- ACCESS dan PNPM-MP di Lombok Barat didukung oleh Bappeda dan BPMD telah setuju untuk bekerja sama dalam mengembangkan RPJMDes di dua kecamatan, Gunung Sari dan Batu Layar.
- Program menyambut kunjungan AusAID-assigned Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-(PNPM) Penasihat Teknis kepada Bappenas yaitu Specialis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, ke Jeneponto dan Bantaeng untuk mempelajari perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan integrasi ke RPJMDes kedalam Musrenbang menjadi masukan dalam pengembangan rencana kerja untuk program CB untuk mendukung Pemerintah Daerah melaksanakan dan mempertahankan Program PNPM.
- Juga telah diadakan diskusi awal dengan PNPM di Kupang dan Kabupaten TTS mengenai pelatihan bagi para pemimpin perempuan, pelatihan bagi kepala desa dan BPD dan untuk kader desa / fasilitator (KPM) untuk pengembangan RPJMDes
- ACCESS menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Asia Foundation melalui Program Inisiatif Masyarakat Sipil Terhadap Kemiskinan 2 di bidang penganggaran pro-kaum miskin dan ADD
- ACCESS juga melakukan diskusi dengan Program *Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy* (ANTARA), Oxfam-GB dan stakeholder lainnya di NTT mengenai pengembangan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran Desa untuk mendukung pembangunan desa
- Mitra ACCESS di TTS dan Kabupaten Kupang juga mencari peluang untuk bekerja sama dengan AIP-MNH dalam melaksanakan agenda kesehatan seperti yang direncanakan dalam PAK.
- ACCESS menjadi tuan rumah grup sekitar 40 orang dari Proyek UNDP. Dukungan untuk Memperkuat Kapasitas dan Peran OMS dalam Pemulihan

"Saya sangat mendukung rencana aksi Pelintas pada partisipatif dan inklusif perencanaan dan penganggaran. Saat ini Pelintas sudah mendapat dukungan dari ACCESS pada 6 kecamatan dari total 21 kecamatan di Kabupaten Buton. Ini berarti hanya 15 kecamatan yang belum terbantu (oleh ACCESS). Apakah mungkin, kesuksesan di 6 kecamatan dapat ditularkan kepada kecamatan yang belum tersentuh? Jika memungkinkan, kami dari pemerintah kabupaten telah siap untuk membantu dalam merealisasikan dokumen perencanaan desa untuk partisipatif dan inklusi di seluruh desa di kabupaten Buton". (La Ode Tuwu, Head of Bappeda, Buton District)

Masyarakat di Aceh dan Nias, untuk Program kegiatan di Lombok. Kelompok ini terdiri dari 32 pemimpin dari latar belakang yang berbeda, tujuh fasilitator dari Pusat Sumber Daya Masyarakat Sipil dari IMPACT (Banda Aceh) dan FORNIHA (Nias) dan dua wakil dari UNDP.

Ada bukti bahwa pendekatan ACCESS sedang diadopsi oleh pemerintah dan lembaga donor dalam bentuk kerjasama, pembiayaan bersama (lihat bagian 2.2.3) dan replikasi. ACCESS telah menerima undangan untuk bekerja sama dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk mendukung program mereka, seperti Departemen Kehutanan di Lombok Barat pada Departemen Kehutanan di Lombok Barat pada Kesinambungan Masyarakat berbasis Kehutanan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Dinas Pendidikan di Bau-Bau untuk melakukan Kartu Laporan Warga dengan orangtua anak-anak sekolah. Melalui promosi aktif dari praktek-praktek yang baik dari dua program ACCESS yang didanai oleh AusAID, CAHHF dan Fasilitas IAFCP, meminta izin untuk menggunakan Peraturan Terhadap Penyimpangan yang digunakan ACCESS dan Perencanaan Manajemen Resiko untuk diadopsi dalam program mereka.

Pengembangan FLA sebagai forum konsultatif multi-stakeholder tentang isu-isu tata pemerintahan daerah terbukti menjadi aset bagi lembaga-lembaga donor dan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, di kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, program BASICS menggunakan FLA sebagai forum koordinasi. FLA di Lombok Barat menjadi tuan rumah sebuah forum pada bulan Januari 2010 dengan SKPD, DPRD, OMS, kepala desa dan anggota masyarakat pada topik *Gerdu Cerdas* (Gerakan Terpadu Pembangunan Desa), sebuah inisiatif kebijakan baru dari Bupati. Selama perdebatan para peserta memberikan respons yang positif dan tanggapan masyarakat yang kritis kepada SKPD dan wakil Bupati. Seperti tim IPR yang hadir menyaksikan forum ini, peristiwa semacam itu menunjukkan bahwa keterlibatan warga dapat mempengaruhi cara agenda pembangunan daerah yang ditujukan dan diterapkan untuk lebih mencerminkan prioritas masyarakat.¹⁸

PAK juga menunjukkan nilainya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Seperti dituturkan oleh Kris Koroh, Sekretaris Bappeda Kabupaten Kupang, setelah menghadiri pertemuan PAK (*Pertemuan Apresiatif Kabupaten*): *"Sampai sekarang, proses pembuatan RPJMDes di Kupang memakan waktu lama. Oleh karena itu, agenda yang dihasilkan oleh PAK ini harus diserahkan kepada Bupati dan Bappeda sebagai kontribusi untuk mengembangkan RPJMDes. Agenda ini muncul dari sebuah proses refleksi mendalam dari peserta yang berasal dari*

"Saat ini Pemerintah kota Bau-Bau mengembangkan pembangunan jangka panjang dari kota Bau-Bau. Saya berharap hasil kegiatan promosi pada visi PAK dan agenda dapat memperkaya visi jangka panjang dari kota Bau-Bau". (Drs. Sudjito, MM, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kota Bau-Bau)

masyarakat pedesaan yang benar-benar menjadi agen pembangunan di desa-desa mereka". Demikian pula, Bappeda Kabupaten Bima setuju untuk menggunakan beberapa poin dalam visi dan agenda Pertemuan Apresiatif Kabupaten Bima dalam konsep RPJMDes untuk tahun 2010-2015.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ACCESS di Tujuan 4 adalah:

• Program ini telah berhasil dalam **memperkuat sinergi dalam kabupaten**. Ada komunikasi

yang lebih rutin antara para stakeholder dan Pemerintah Daerah yang menjadi

¹⁸ Lihat Carcasson, Martin (2009) "Mulai dengan tidak berpikir: Panggilan untuk tujuan Permufakatan", *lembaran tak berkala* 2:19, Pusat bagi Kemajuan dalam Interaksi Publik yang mana ia mengatakan "Keputusan institusi dibuat untuk mencapai persetujuan dengan mutu yang baik dari proses musyawarah cenderung menjadi lebih sah dan berkelanjutan" Hal.12

pendukung untuk pendekatan dengan berbagi pembelajaran dan mereplikasi elemen-elemen Program.

Mendemonstrasikan ketangguhan pendekatan ACCESS menjadi sangat penting dalam mempengaruhi Pemerintah Daerah. Mereka terkesan dengan aplikasi praktis yang memungkinkan mereka untuk merespon dan menerapkan peraturan pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.

Pemerintah daerah telah **melihat bukti** bahwa dana pembangunan digunakan lebih efektif dan mereka mengakui manfaat penggunaan dokumen perencanaan desa tidak hanya oleh pemerintah desa, tetapi juga oleh SKPD, PNPM dan organisasi-organisasi lainnya. Berbagi hal-hal ini dengan rekan-rekan mereka menciptakan peluang bagi penyebaran lebih lanjut dari praktek yang baik.

3 Kemajuan Pelaksanaan terhadap Lima Daerah Fungsional

Sejumlah kegiatan program kunci telah teridentifikasi selama tahap perencanaan. Kegiatan-kegiatan ini, dikelompokkan dalam lima bidang fungsional, menjelaskan peran dan tanggung jawab Program serta para stakeholder lainnya. Kemajuan terhadap area fungsional yang dijelaskan di bawah, sementara kemajuan terhadap indikator keluar dan kegiatan untuk kelima Daerah Fungsional untuk pelaporan periode November 2009 sampai Maret 2010 diberikan dalam Hasil Pengawasan Matrix dalam lampiran 2.

3.1 Area Fungsional 1: Menyediakan Sumber Daya dan Mengelola Program

Manajemen ACCESS dan tim administrasi berjalan berdasarkan rencana dalam hal sumber daya dan administrasi Program.

Kerja yang signifikan telah dilakukan selama periode pelaporan untuk memperbarui dan merancang kembali Sistem Informasi Manajemen (MIS), ERSULA, untuk mempertimbangkan perubahan yang diusulkan ke Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pembelajaran Partisipatif (PAMELS) dan 12 bulan berikutnya pengalaman implementasi. Sistem Informasi manajemen (MIS) yang baru ini bertujuan lebih ramah bagi penggunaannya dan memungkinkan koleksi data hibah juga sebagai pengawasan komprehensif dan evaluasi data. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen (MIS) baru direncanakan untuk periode pelaporan berikutnya.

Sebagai bagian dari Rencana Peraturan terhadap Penyimpangan, audit keuangan Mitra ACCESS telah dilakukan untuk tiga Mitra Strategis dan dan satu pemegang Proyek hibah selama periode pelaporan. Tim keuangan terus memberikan dukungan keuangan untuk mitra secara bulanan.

IDSS, Kontraktor Pelaksana, memperkenalkan paket baru keuangan manajemen dan sistem kartu absen selama periode pelaporan. Administrasi ACCESS dan staff keuangan menjalani pelatihan oleh staff dari Melbourne untuk menggunakan system ini. Prosedur Internal dan format telah diperbarui selama periode pelaporan untuk memenuhi persyaratan sistem baru.

Semua laporan-laporan kontraktual ke AusAID, termasuk laporan bulanan hibah, Tabel Penyimpangan Keuangan, laporan enam bulanan dan Konsep Rencana Tahunan diajukan pada saat masa jatuh tempo mereka.

Program ini memberikan dukungan logistik dan kesekretariatan kepada AusAID untuk persiapan IPR yang terjadi pada bulan Januari. Bantuan diberikan untuk menjadwalkan program, termasuk pengaturan perjalanan dan hotel, dan untuk menyediakan dukungan logistic di lapangan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan waktu, tim IPR, tim SS dan TAT, dengan masukan dari tim propinsi, menyediakan materi-materi IPR yang lengkap, yang mencakup semua data tentang lokasi IPR yang dikunjungi, serta Lembar Fakta dan lembaran menarik lainnya yang akan membantu IPR untuk lebih memahami Program (lihat Lampiran 4 untuk melihat daftar dokumen yang dihasilkan).

Tantangan utama yang dialami selama periode pelaporan dalam area Fungsional 1 terkait dengan mengelola beban kerja staf dan memastikan bahwa staf supaya lebih sering mengambil cuti untuk meminimalkan kemungkinan beban kerja yang tinggi dan berkelanjutan.

3.2 Area Fungsional 2: Interaksi aktif dengan CS dan Pemerintah berdasarkan nilai-nilai/prinsip bersama.

ACCESS telah membuat kemajuan yang signifikan dalam Area Fungsional 2 selama enam bulan terakhir. Semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana.

Seperti tercantum dalam laporan enam bulanan sebelumnya, salah satu tantangan utama dalam Area Fungsional 2 berpusat pada kebutuhan untuk menciptakan rasa kepemilikan yang lebih dalam oleh CS dan Pemerintah Daerah pada rencana kabupaten, PAK dan prioritas yang sudah diidentifikasi. Pelaksanaan kegiatan pada periode dilakukan untuk mengatasi masalah ini dengan pertemuan kunci para stakeholder FLA multi-stakeholder membahas tantangan ini dan memperbaiki strategi untuk mempromosikan rasa kepemilikan dan keberlanjutan.

IPR yang dilakukan pada bulan Januari 2010 membantu proses ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada FLA dan para stakeholder lainnya yang terkait dengan tantangan ini. Kegiatan selama periode ini telah difokuskan pada:

Mendirikan FLA di distrik-distrik baru:

Forum FLA multi-stakeholder telah terbentuk di delapan kabupaten baru dan sedang berkonsolidasi dengan yang menjadi peran mereka dan prinsip-prinsipnya. Dengan pembelajaran dari kabupaten lama, berbagai upaya dilakukan untuk bekerja dengan anggota FLA membahas apa itu forum FLA, bagaimana fungsinya, dan apa yang mendasari prinsip-prinsipnya.

Berbagi pembelajaran dalam mendukung pemerintahan local yang demokratis:

ACCESS telah menyediakan berbagai peluang untuk membahas isu pemerintah local yang demokratis di kabupaten-kabupaten baru. Sebagai contoh:

- Di Bima dan Dompu, ACCESS mendukung kegiatan pembelajaran pada perencanaan dan penganggaran yang partisipatif yang berhasil meningkatkan pemahaman peserta dan rasa percaya diri dalam topik ini.
- Di Buton Utara, FLA mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas tentang bagaimana mereka dapat mendukung kualitas pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) yang berkualitas.
- OMS dan pemerintah lokal dari kabupaten Kupang dan TTS menunjukkan minat yang tinggi selama pembelajaran pada perencanaan dan penganggaran yang partisipatif. Akibatnya kedua pemerintah daerah itu berkomitmen untuk bekerja sama dengan OMS dalam memfasilitasi RPJMDes dan memastikan untuk tetap berhubungan mengenai proses perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.

Melalui proses berbagi pembelajaran, ACCESS bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai penggerak dan sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran, peserta mengembangkan rasa kepemilikan yang lebih dalam.

Lokakarya PAK kabupaten baru:

Kegiatan utama di delapan kabupaten baru adalah lokakarya PAK yang sudah dimulai sejak pelaporan sebelumnya dan diselesaikan pada bulan November 2009. Lokakarya ini berlangsung selama empat hari lamanya dan melibatkan 256 peserta (136 perempuan dan 120 laki-laki) dari Pemerintah Daerah, DPRD, OMS, anggota masyarakat, sektor swasta, media, dan lainnya. Menurut peserta, lokakarya ini merupakan sukses besar bukan hanya menghasilkan visi dan agenda yang jelas pada isu-isu kunci LDG di setiap kabupaten, tetapi juga dalam menciptakan antusiasme umum untuk bekerja lebih jauh dan mengembangkan hasil-hasilnya.

Penguatan FLA di kabupaten-kabupaten lama:

FLA terus bertemu secara teratur dengan 12 kali rapat yang diadakan selama periode pelaporan dengan total 199 peserta (69 perempuan dan 130 laki-laki) untuk membahas isu-isu pemerintahan demokratis lokal yang berkaitan dengan daerah mereka sendiri. Topik diskusi meliputi:

- Promosi FLA
- Perencanaan dan penganggaran yang berspektif gender
- Sinkronisasi program pemberdayaan masyarakat
- Agenda PAK
- Peran OMS dalam memfasilitasi pembangunan daerah
- Interaksi Dinamis
- Dengar Pendapat dengan DPRD

“Program ACCESS benar-benar luar biasa. Selama saya menjadi bagian dalam rapat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau program lainnya, saya tidak pernah merasa dihargai seperti ini. Ruangannya dihiasi seperti perayaan dan kita merasa senang dan aman”.
(Jamuddin, Kepala Desa Pebaoa, Buton Utara dan Peserta PAK)

Kaji ulang PAK di Kabupaten Lama:

Kaji ulang PAK telah dilakukan di Jeneponto dan Bantaeng di bulan Januari 2010 dan yang lain akan diselesaikan pada akhir Mei 2010. Kegiatan ini dihadiri oleh para stakeholder kunci kabupaten (peserta di Jeneponto: 14 perempuan dan 16 laki-laki; peserta Bantaeng: 13 perempuan dan 17 laki-laki). Tinjauan ini, dirancang sehingga FLA dan

stakeholder kunci lainnya secara bersama-sama merefleksikan kemajuan terhadap visi kabupaten telah mengakibatkan:

- Mempertajam definisi pemerintahan lokal yang demokratis.
- Identifikasi keberhasilan individu dan organisasi dan perubahan yang dibutuhkan untuk hasil yang lebih baik.
- Perluasan jumlah aktor yang terlibat
- Memperkuat komitmen terhadap visi pemerintahan demokratis lokal
- Rencana untuk memantau kegiatan dan kesepakatan untuk menggunakan hasil dari kaji ulang FLA pada tahun yang akan datang

Tantangan utama yang masih ada dalam melaksanakan Area Fungsional 2 adalah untuk mendorong rasa kepemilikan yang lebih besar dari rencana kabupaten yang lebih luas oleh para anggota FLA. FLA sebagai komunitas pelaksana, orang berkomitmen untuk mempromosikan tata pemerintahan local yang demokratis, penting untuk dipahami hubungan antara visi PAK dan agenda. Tujuan dari visi ini adalah untuk menunjukkan bahwa bekerja pada satu atau beberapa agenda

memberikan kontribusi untuk perubahan yang lebih besar dan perubahan yang berkesinambungan. Jika FLA menjadi penggerak perubahan, hubungan antara visi dan agenda harus dimengerti dan diartikulasikan dengan jelas.

3.3 Area Fungsional 3: Membangun kapasitas institusi lokal

Kemajuan yang signifikan telah terjadi di Daerah Fungsional 3 selama periode pelaporan ini. Setelah pemilihan Mitra Strategis dan finalisasi rencana CB pada periode pelaporan terakhir, kegiatan CB dimulai secara lebih serius pada November 2009.

Pemberian Perjanjian Proyek Dana Hibah (PGA):

Selama periode ini, empat PGA telah diberikan kepada Mitra Strategis, sehingga PGA untuk Mitra Strategis sebanyak tujuh. 11 Task Notes yang sudah diberikan pada periode ini dapat dilihat pada Tabel 4. Kegiatan CB dalam task notes ini akan dilanjutkan pada periode pelaporan berikutnya.

Tabel 4: Task Notes yang sudah dikeluarkan

Organisasi Penerima PGA	Task Notes (TN) yang sudah diberikan	Kegiatan CB yang dilaporkan
Inspirit	3	TN 2: Berbagi Pembelajaran tentang penggunaan Appreciative Inquiry ACCESS pada Konferensi Dunia 2009 (Menciptakan Revolusi Positif untuk Perubahan Berkelanjutan) di Kathmandu, Nepal. TN 3: Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan memfasilitasi bagi OMS di Sumba Barat dan Timur. TN 4: Pelatihan dan bantuan teknis terhadap penggunaan pendekatan berbasis kekuatan pada rencana aksi mitra di Lombok Barat dan Tengah.
Gita Pertiwi	1	TN 1: Pelatihan dan bantuan teknis usaha ekonomi desa bagi dua Mitra ACCESS di Sumba Barat.
Remdec	4	TN 1: Pelatihan, bantuan teknis, dan refleksi pada pengorganisasian masyarakat di Sumba Barat dan Timur. TN 2: Pelatihan, bantuan teknis, dan refleksi pada pengorganisasian masyarakat di Lombok Barat dan Tengah. TN 3: Penilaian Kapasitas Mitra ACCESS. TN 4: Pelatihan, bantuan teknis, dan refleksi pada pengorganisasian masyarakat di Buton dan Muna.
ICW	2	TN 1: Pelatihan dan teknik penggunaan kartu laporan warga di Buton dan Muna. TN 2: Pelatihan dan bantuan teknis terhadap penggunaan penelitian partisipatif di bidang pelayanan publik.
Mitra Samya	1	TN 2: Pelatihan di beberapa lokasi maupun bantuan teknis dan refleksi tentang penggunaan CLAPP GSI di 16 Kabupaten.
Total	11	

Dua puluh tiga kegiatan utama Pengembangan Kapasitas (CB) dilakukan selama periode pelaporan oleh ACCESS (11 kegiatan) dan Mitra Strategis ACCESS (12 kegiatan) seperti yang diuraikan pada Tabel 5. Kegiatan ini dipandang sangat sukses dengan 98% dari peserta perempuan sangat puas atau puas dan 97% peserta laki-laki sangat puas atau puas.

Table 5: Kegiatan-kegiatan CB yang dilakukan oleh ACCESS dan Mitra Strategis

No.	Lokasi	Penyedia Layanan	Aktifitas	Pelatihan (Hari)	No. Peserta		
					F	M	T
1	Bau-Bau	ACCESS	Pelatihan SBA untuk FLA	1	11	9	20
2	Buton	ACCESS	Pelatihan keuangan bagi Mitra ACCESS	3	4	3	7
3	Buton & Muna	ICW	Pelatihan CRC bagi Prima & Kritik	4	9	8	17
4	Dompu	ACCESS	Pelatihan OM bagi Mitra	4	13	15	28
5	Lombok	ACCESS	Pelatihan keuangan bagi Mitra ACCESS	3	11	5	16
6	Lombok Barat & Lombok Tengah	Inspirit	ABA & AI & TA	3	12	8	20
7	Lombok Barat dan Lombok Tengah	Remdec	Pengorganisasian Masyarakat	4	11	7	18
8	All old Distircts	Mitra Samya	CLAPP GSI - TOT	6	14	14	28
9	Muna	ACCESS	Lokakarya MEL	2	8	5	13
10	Gowa and Takalar	Mitra Samya	CLAPP GSI - TOF	9	15	15	30
11	Gowa and Takalar	ACCESS	Pelatihan OM bagi Mitra	4	11	11	22
12	Buton and Muna	Mitra Samya	CLAPP GSI - TOF	9	9	10	19
13	Buton	ACCESS	Lokakarya MEL bagi FLA	2	10	6	16
14	Bau-Bau	ACCESS	Pelatihan OM bagi Mitra	4	3	13	16
15	Sumba Barat and Sumba Timur	ACCESS	Pelatihan Keuangan bagi Mitra ACCESS	2	5	5	10
16	Sumba Barat	Gita Pertiwi	Pelatihan kewirausahaan	4	*	*	0
17	Sumba Barat	Inspirit	Fasilitasi & ABA	3	14	14	28
18	Sumba Barat and Sumba Timur	Remdec	Pengorganisasian masyarakat	4	16	14	30
18	Sumba Timur	ICW	Penelitian partisipatif	4	*	*	0
20	Sumba Timur	Inspirit	Fasilitasi Aktif & ABA	3	14	12	26
21	Dompu and Bima	ACCESS	Pelatihan keuangan bagi Mitra ACCESS	3	6	3	9
22	Kupang	ACCESS	Pelatihan keuangan bagi Mitra ACCESS	3	8	1	9

No.	Lokasi	Penyedia Layanan	Aktifitas	Pelatihan (Hari)	No. Peserta		
					F	M	T
23	TTS/Kupang	ACCESS	Pelatihan OM bagi Mitra	4	6	14	20
			Total	64	217	210	427

*Laporan pelatihan belum tersedia

Rencana Pengembangan Kapasitas (CB) di Provinsi dan Kabupaten:

Pada bulan Februari 2010 di Bali diadakan pertemuan dengan delapan fasilitator utama (empat perempuan dan empat laki-laki) untuk penilaian kapasitas, koordinator propinsi dan Tim Penasihat Teknis (TAT) ACCESS, menyampaikan harapan dari penilaian dan mendapatkan pemahaman umum tentang proses dan kebutuhan informasi. Pada bulan Maret 2010, sebuah rancangan lokakarya dilakukan untuk mengembangkan perangkat yang berdasarkan *Outcome* Hasil Pemetaan Alat Potret (OMST)¹⁹ yang digunakan dalam proses rencana aksi. Penilaian itu sendiri akan dilakukan bersama semua Mitra dan calon mitra dalam periode pelaporan berikutnya.

Revisi CLAPP:

Revisi Komunitas Led Proses Aksi secara Partisipatif (CLAPP) diselesaikan selama periode ini dengan garis pedoman untuk mulai menggunakan perencanaan dan penganggaran dan M&E mulai digunakan dalam kegiatan pelatihan. Mitra Samya, sebuah Mitra Strategis, melakukan pelatihan bagi pelatih pada Desember 2009 dengan 28 peserta (14 perempuan dan 14 laki-laki). Pelatih-pelatih ini kemudian melakukan pelatihan fasilitator di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan (lihat Tabel 5).

Mempersiapkan panduan, metode-metode, dan peralatan untuk mendukung Area Fungsional 2, 4 dan 5:

Selama periode ini, beberapa pedoman dan alat telah dikembangkan termasuk finalisasi petunjuk untuk memfasilitasi proses PAK, pedoman untuk menggunakan kerangka OM dalam pengembangan Pengawasan & Evaluasi (M&E) dan pedoman untuk melaksanakan penilaian dan perencanaan aksi dengan menggunakan OM. Respon Mitra dan staff ACCESS sangat positif terhadap materi ini.

Tantangan utama yang terkait dengan melakukan kegiatan di Area Fungsional 3 adalah:

Pada saat ada kebutuhan yang muncul, kegiatan CB diselenggarakan di 16 kabupaten dan berkoordinasi dengan 13 Mitra Strategis. Hal ini membuat pekerjaan Petugas Teknik Senior (STO) CB menjadi lebih administratif dari yang dibayangkan sebelumnya. Tantangan ini ditangani dengan melibatkan Mitra Strategis²⁰ dalam melanjutkan penilaian kapasitas dan membangun hubungan baik diantara para Mitra Strategis dan dengan personil lapangan ACCESS. Ini juga diantisipasi bahwa posisi ketiga Grants Officer yang direncanakan untuk kuartal pertama pada APY3, akan fokus pada administrasi agar STO CB dapat lebih berkonsentrasi pada masalah program dan konten permasalahan yang terkait dengan program Pengembangan Kapasitas (CB).

¹⁹ The OMST is a revision of the ODST used in ACCESS Phase I

²⁰ This includes all 13 Strategic Partners who were successful in the Tender, even if the Strategic Partner does not have a PGA signed with ACCESS to undertake CB activities

3.4 Area Fungsional 4: Mendukung perencanaan dan pelaksanaan upaya pembangunan mandiri

Ada kemajuan yang signifikan yang telah dibuat dalam Daerah Fungsional 4 pada periode pelaporan ini.

Pada periode ini, 29 PGA telah dikeluarkan untuk penilaian dan perencanaan rencana aksi dan tujuh PGA dikeluarkan untuk pelaksanaan rencana aksi. Saat ini ada 22 rencana aksi yang sedang berjalan dan sebagai akibat dari rencana aksi ini Mitra ACCESS sedang bekerja di 324 desa seperti tertulis dalam PGA, telah melatih 430 fasilitator desa (207 perempuan dan 223 laki-laki) di CLAPP GSI²¹, akan membantu masyarakat mengembangkan 255 RPMJDes dan sedang bekerja dengan 287 CBO²² dan 6 asosiasi CBO.

Sebelum penilaian yang dilakukan, staf ACCESS di setiap propinsi, dengan dukungan dari Tim Penasehat Teknis (TAT), memberikan pelatihan kepada Mitra ACCESS yang berpotensi dalam penilaian partisipatif dengan pengenalan OM dan memberikan pemantauan dalam menulis proposal. Sebagian besar peserta pelatihan menganggap ini penting dan disampaikan dengan baik dengan tingkat kepuasan secara keseluruhan sebesar 100% untuk laki-laki dan 98% untuk perempuan. 29 penilaian diharapkan akan selesai pada akhir April.

Tantangan dalam pelaksanaan di Area Fungsional 4 adalah:

Beberapa Pemerintah Daerah, Mitra ACCESS dan penerima manfaat utama masih melihat hasil upaya dari perencanaan dan penganggaran desa secara partisipatif untuk menghasilkan dokumen (contohnya RPJMDes) itu sendiri dan masih kurang dalam **bagaimana menggunakan mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk mengorganisir warganya untuk mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan-kegiatan** pembangunan dan investasi bagi masyarakat miskin, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. ACCESS akan membantu Mitra yang masih berusaha berbagi cerita keberhasilan di tempat lain di mana masyarakat berhasil menggunakan mekanisme perencanaan dan penganggaran untuk mendapatkan dukungan untuk kegiatan pembangunan desa.

Bekerja dengan pendekatan baru, seperti aktor-pusat SBA, dalam menghadapi paradigma yang sudah tertanam lama, **paradigma pembangunan** adalah tantangan bagi semua stakeholder program. ACCESS dan Mitra Strategis akan terus mendorong komitmen yang konsisten dengan pendekatan dan prinsip-prinsip ACCESS dan terus mempromosikan pembelajaran yang berkesinambungan untuk membantu Mitra dalam melakukan hal-hal yang berbeda. Lokarya Kajian Kemajuan Mitra akan memberikan ruang bagi ACCESS untuk mengkaji kemajuan Mitra kita di area tematis utama dan memberikan kesempatan bagi ACCESS untuk mendiskusikan dengan Mitra tentang strategi dan pendekatan mereka. ACCESS juga akan menginvestigasi pada kesempatan lain dalam Rencana Tahunan per tahun-(APY) 3 untuk memperkuat komitmen Mitra dengan prinsip-prinsip kunci ACCESS.

²¹ Khusus untuk bekerja pada pengembangan RPJMDes

²² Ini termasuk 83 pusat-pusat komunitas, 32 kelompok petani, 27 komite sekolah, 39 kelompok ekonomi (yang mana 30 adalah kelompok khusus perempuan), 6 BUMDes, 27 kelompok pengguna air, 4 kelompok pemuda, 20 kelompok lingkungan, 9 Kelompok Swadaya Masyarakat.

3.5 Area Fungsional 5: Mengembangkan pembelajaran berkelanjutan, perubahan kebijakan dan pelaksanaan baik secara internal maupun external

Area Fungsional 5 menunjukkan kemajuan yang baik dalam periode pelaporan ini dengan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Kegiatan utama dilaksanakan selama periode pelaporan akan dibahas di bawah ini.

Memantau secara partisipatif pelaksanaan kegiatan proyek dana hibah berdampingan lembaga-lembaga OMS lokal dan mengambil bagian untuk mengatasi isu-isu:

24 pemantauan triwulan telah dilakukan oleh staff ACCESS.

Dua Lokakarya Pengawasan, Evaluasi, dan Pembelajaran (MEL) telah berhasil dilakukan dengan Mitra ACCESS di Buton dan kabupaten Muna dengan total 29 peserta (18 perempuan dan 11 laki-laki). Panduan Pengawasan, Evaluasi dan Pembelajaran (MEL) sekarang sedang disusun berdasarkan permintaan dari staf ACCESS dan Mitra.

Mendukung FLA untuk menganalisa dan meninjau proses lokal dan perubahan praktik tata kelola dan kebijakan dan memantau perubahan kekuatan Masyarakat Sipil (CS) di tingkat kabupaten dan kapasitas Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

Selama periode ini, satu lokakarya MEL dilakukan dengan FLA di kabupaten Buton dengan total 17 peserta (7 laki-laki dan 10 perempuan).

Tinjauan Dua Tahunan PAK dilakukan di kabupaten Jeneponto dan Bantaeng (lihat bagian 3.2).

Menyelenggarakan Penelitian Penguatan Masyarakat Sipil (CS) dan analisis kebijakan program dengan lembaga-lembaga lokal dan mendukung inisiatif Masyarakat Sipil (CS) yang inovatif:

Lima proposal untuk dana hibah inovatif dan Pengetahuan telah diterima oleh ACCESS dalam periode pelaporan dan sudah dinilai dan disetujui (lihat Lampiran 5).

Dua penelitian saat ini sedang diselesaikan, salah satunya adalah tentang kepemimpinan perempuan dan yang lainnya tentang BUMDes dan keduanya diperkirakan akan diterbitkan dalam periode pelaporan berikutnya. Salah satu studi yang lain untuk meninjau hasil perencanaan desa dan pelaksanaan RPJMdes di sejumlah desa di empat kecamatan di Sumba Timur telah dimulai pada bulan Maret 2010 dan akan selesai dalam beberapa bulan mendatang.

Berbagi pembelajaran dan menyebarkan alat dan metode dalam kabupaten dan di antara para peserta ACCESS:

Banyak Mitra ACCESS dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya mengambil inisiatif sendiri untuk berbagi pembelajaran satu sama lain juga dengan Pemerintah Daerah di 16 kabupaten (lihat bagian 2.2.3). Ini termasuk pertemuan rutin dari FLA di kabupaten-kabupaten lama dengan banyaknya pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk berbagi pembelajaran.

Telah terjadi peningkatan liputan media lokal dan nasional mengenai ACCESS sejak periode pelaporan terakhir dengan peningkatan jumlah artikel yang ditulis tentang ACCESS sampai 17 artikel dibandingkan dengan 13 artikel pada periode pelaporan

sebelumnya. Sebuah artikel opini oleh staf ACCESS mengenai pendekatan ACCESS dalam *Musrenbangdes* diterbitkan dalam Pos Kupang, NTT. Situs web ACCESS menerima 6629 kunjungan dari bulan November 2009 hingga Februari 2010.

Sebanyak 4.000 salinan edisi ketiga dari Buletin ACCESS, yang berfokus pada pelayanan publik, secara luas didistribusikan ke desa-desa Organisasi Berbasis Masyarakat (CBO), LSM, fasilitator desa, pemerintahan desa, kabupaten dan pemerintah pusat, serta lembaga donor. Sejumlah publikasi lainnya juga telah diproduksi pada periode pelaporan ini dan disajikan dalam Lampiran 4.

Dalam hal tantangan dalam pelaksanaan Daerah Fungsional 5, tim provinsi harus **menyeimbangkan prioritas kerja** untuk mendukung dan memantau pelaksanaan proyek Mitra dan untuk mempromosikan pembelajaran secara terus menerus untuk perubahan kebijakan dan praktik. Hal ini akan menjadi semakin menantang karena jumlah PGA meningkat. Efisiensi waktu adalah untuk mendorong staf Pemerintah Daerah untuk bergabung dengan tim provinsi dan Mitra ACCESS dalam mengawasi kegiatan (seperti kunjungan lapangan dan pertemuan enam bulanan untuk meninjau kemajuan Mitra bersama Mitra individu dan perwakilan masyarakat). Secara khusus, pemantauan lapangan ini membuat pejabat Pemerintah Daerah langsung melakukan praktek yang baik selama pelaksanaan proyek.

4 Pengawasan, Evaluasi dan Pembelajaran

4.1 Pengawasan dan Evaluasi

Salah satu aktivitas utama selama periode ini adalah permulaan kerja untuk merevisi PAMELS berdasarkan pengalaman implementasi. Saran terbaru dari AusAID adalah bahwa ACCESS harus memberikan perhatian lebih pada hasil pelaporan dan dampak yang muncul dari Program. Menanggapi hal ini ACCESS berencana untuk memberikan hasil lebih yang bisa menjadi kontribusi dalam pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pelayanan public dalam perubahan perilaku.

Sebagai bagian dari tinjauan PAMELS, ACCESS mengadakan lokakarya satu hari dengan staf Program pada bulan Februari 2010 untuk meninjau Logika Matrix. Logika Matrix yang asli memiliki pernyataan inti dan kerangka tujuan yang dinyatakan sebagai perubahan perilaku yang dianggap sangat penting dalam mempromosikan tata pemerintahan demokratis lokal. Indikator-indikator untuk perubahan perilaku diidentifikasi sebagai ukuran terhadap kinerja program sementara hasilnya difokuskan pada tingkat dampak bagi penerima manfaat. utama. Disepakati bahwa pernyataan inti dan tujuan utama memberikan gambaran yang jelas terhadap teori perubahan dan seharusnya tidak diubah. Namun, berbagai hasil antara layak dan dampak pada lingkungan pada kegiatan saat ini telah didiskusikan dan disepakati. Ini kemudian diproses untuk menghasilkan seperangkat indikator konsep yang singkat untuk mendapatkan hasil program dan menyelaraskan hasil yang lebih baik dengan pencapaian program dalam bidang peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

Program tetap menyadari bahwa hasil yang muncul tetap sangat tergantung pada faktor di luar kendali Program (yaitu motivasi dan kapasitas Mitra ACCESS, Pemerintah Daerah dan warga dan organisasi-organisasi mereka untuk bekerja sama) sehingga hasil terbaik harus dilihat pada tahap ini sebagai indikasi kontribusi Program, bukan hubungan sebab akibat. Perubahan perilaku akan terus dipantau Mitra karena ini dianggap sebagai unsur yang paling penting untuk membawa perubahan jangka panjang. Data ini sebagian besar akan digunakan untuk

pengelolaan program dan pembelajaran dan sebagai bagian dari kontribusi akhir analisis terhadap program.

Revisi PAMELS diharapkan akan selesai selama periode pelaporan berikutnya sehingga rekomendasi dari laporan akhir IPR (diharapkan pada tanggal 31 Maret 2010) dapat dimasukkan.

4.2 Pembelajaran yang dipelajari Berasal dari Pelaksanaan Program

Ringkasan berikut ini menyediakan pembelajaran utama selama pelaporan periode November 2009-Maret 2010 terhadap tiga strategi Program:

Pemberdayaan

- Untuk meningkatkan pemahaman dan praktek dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat ada kebutuhan untuk upaya yang berkesinambungan oleh seluruh stakeholder. Untuk memastikan partisipasi dalam pemberdayaan, harus ada proses yang terus menerus dan direncanakan secara khusus yang dirancang untuk mendorong partisipasi yang sama baik dalam hal jumlah, serta dalam proses pengambilan keputusan yang nyata. Jika ada proses yang baik dengan upaya berkesinambungan untuk melibatkan perempuan dan kaum miskin, orang akan merespon dengan penuh antusias.
- Untuk memastikan bahwa partisipasi dalam desa dan dalam proses perencanaan tidak berhenti pada produksi RPMJDes perlu dipertahankan Pengembangan Kapasitas (CB) untuk Mitra ACCESS dan masyarakat untuk lebih memahami cara menggunakan perencanaan desa dan mekanisme penganggaran dan untuk menata diri supaya mereka mendapatkan manfaat yang baik dari kegiatan pembangunan desa.

Interaksi

- Staf ACCESS pada tingkat provinsi sangat perlu untuk menyadari suasana politik lokal dan asosiasi 'politik bagasi' dari oknum-oknum pemerintah yang mampu secara efektif menangani resiko yang melekat dengan Pemerintah Daerah dan melalui sistem pemerintahan. Harus selalu mempertimbangkan secara seksama konteks politik yang berubah.
- Upaya-upaya interaksi tampaknya akan lebih berhasil bila ada fokus pada membangun rasa saling percaya. Pencapaian terbaik untuk ini adalah ketika ada peluang dan mekanisme yang terstruktur untuk mendorong interaksi. Pemerintah Daerah semakin mengakui peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam pembangunan daerah, dibuktikan oleh kemauan Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi bagi inisiatif OMS. Namun, jika hubungan ini tidak terus dibina untuk saling meningkatkan pada kedua belah pihak maka hubungan ini tidak akan berkelanjutan. Upaya-upaya yang berkesinambungan perlu dilakukan untuk mempertahankan sebuah momentum yang semakin berkembang dan nyata di kabupaten sasaran.

Scaling-up

- Memanfaatkan dana Pemerintah yang dan pendekatan *scaling-up ACCESS*' dan menjadi lebih giat ketika pendekatan ini bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan Pemerintah Daerah dan menyelaraskan dengan

program provinsi dan kebijakan pemerintah kabupaten, dan prioritas-prioritas. Pendekatan ACCESS telah terbukti bekerja dengan baik ketika mereka mendukung agenda provinsi dan kebijakan pemerintah kabupaten dan legislatif.

- Jika scaling-up terjadi terlalu cepat, dapat menyebabkan penurunan kualitas pendekatan serta jalan pintas yang diambil dalam proses. Dalam rangka menjaga kualitas proses, strategi jaminan kualitas yang jelas harus ada sejak awal untuk menghindari resiko ini. Ini akan meminimalkan resiko mengurangi kualitas hasil pada tingkat dampak.

5 Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah salah satu pilar utama dalam Strategi Pedesaan 2008-2013. Pendekatan ACCESS yang diarahkan untuk menjamin keberlanjutan karena dibangun pada modal manusia, social, teknis, dan keuangan yang ada dengan membangun kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) sebagai agen perubahan, dengan mendukung interaksi yang lebih efektif dari sisi permintaan dan dengan bekerja untuk memperkaya sistem pemerintah yang ada dan proses-prosesnya.

Kontribusi terhadap keberlanjutan selama periode ini dapat ditunjukkan oleh:

- Dukungan eksplisit dari pendekatan ACCESS pada pemerintah daerah dan nasional khususnya dalam penyatuan proses perencanaan kabupaten-secara luas dibuktikan oleh permintaan untuk replikasi dari proses-proses ini ke daerah-daerah di luar kabupaten sasaran ACCESS, dan kontribusi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung rencana aksi Mitra;
- Antusiasme antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), masyarakat dan Pemerintah Daerah dan kemauan dari stakeholder untuk berinteraksi secara lebih positif dan efektif. Membangun kepercayaan ini akhirnya memungkinkan partisipasi penuh dari kedua sisi permintaan dan penawaran dalam proses demokrasi;
- Peningkatan modal sosial melalui CB ditawarkan oleh ACCESS;
- Peningkatan tata kelola yang baik dari Mitra ACCESS melalui fokus pada transparansi dan akuntabilitas dan menargetkan dukungan CB di daerah ini;
- Penggunaan pendekatan baru untuk pemberdayaan masyarakat oleh Mitra ACCESS termasuk pengembangan partisipatif pro-kaum miskin, Pengarusutamaan GSI dan pembelajaran secara berkesinambungan. Uji coba dan menunjukkan apa yang berhasil menciptakan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk berinvestasi dalam praktek-praktek baru dengan tingkat resiko yang rendah.

6 Isu-Isu yang Bersinggungan

6.1 Kesetaraan Gender

Program ini terus mempromosikan kesetaraan gender di semua fungsi Program. Untuk periode pelaporan ini, perempuan terdiri 47% dari total peserta pelatihan dan dicatat 46% dari total hari pada pelatihan. Dukungan khusus telah diberikan kepada organisasi berbasis perempuan seperti FP2KK dan FP3M di Sumbawa, JARPUK dan SSP di Timor, dan APAK dan Lambu Ina di Sulawesi Tenggara.

Sebuah studi tentang kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh sebuah LSM, Kapal Perempuan, yang didanai melalui Dana Hibah Inovatif. Studi ini mengeksplorasi hasil dan inisiatif berkesinambungan dari kepemimpinan perempuan

melalui ACCESS tahap I dan implikasinya pada program CB di tahap II. Lokasi penelitiannya adalah Sulawesi Selatan dan NTB dan termasuk wawancara dengan pemimpin perempuan, tokoh masyarakat, pemimpin masyarakat, OMS dan penyedia pelatihan tahap I.

Studi ini menemukan bahwa walaupun desentralisasi dan kebijakan nasional untuk pengarusutamaan gender memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, masih tertanam adat, agama dan praktik pemerintah yang terus menjadi kendala bagi perempuan untuk mencoba berpartisipasi penuh dalam pembangunan daerah. Studi ini juga menemukan alumni perempuan dari ACCESS tahap I yang lebih percaya diri dan diberdayakan, telah memulai perubahan sosial di desa-desa dan kecamatan, mereka memperlihatkan bahwa program sudah membangun keahlian mereka untuk menggerakkan orang lain dalam isu-isu kunci pembangunan bagi perempuan. Laporan itu digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan 1 hari lokakarya dengan managerial provinsi dan TAT ACCESS tentang kepemimpinan perempuan.

Saat ini program memberikan tanggapan atas rekomendasi yang dilanjutkan oleh ACCESS dengan contoh yang baik untuk membangun kepemimpinan perempuan tetapi dengan penekanan pada peningkatan kekuatan ketrampilan yang kritis untuk analisa gender dan integrasi dengan perspektif gender. Inisiatif Kepemimpinan perempuan akan dilakukan di Sulawesi Selatan melalui Mitra Strategis. Hal ini akan menyediakan dasar pembelajaran dan replikasi pada kabupaten lain yang mendukung ACCESS. Sementara itu, laporan ini akan difinalisasi untuk publikasi, bersama dengan cerita mengenai perbedaan dari pemimpin-pemimpin perempuan.



ASSESSING GENDER RESPONSIVE
LOCAL CAPACITY DEVELOPMENT
IN INDONESIA

Selain itu, agenda-agenda FLA yang dikeluarkan pada kabupaten-kabupaten baru, ada 3 proyek yang potensial mengenai kekerasan rumah tangga yang saat ini sedang dalam tahap peninjauan. Hal ini akan mencakup berbagai isu-isu pemerintah termasuk pemberdayaan perempuan, dukungan untuk hak-hak perempuan dan anak dan perlindungan terhadap kekerasan melalui perbaikan dalam sistem hukum dan sosial.



Publikasi UNDP-SNV, "Menilai Perkembangan Gender Kapasitas Lokal secara Responsif di Indonesia", yang menjadi kontribusi ACCESS selama periode pelaporan sebelumnya telah diterbitkan pada periode pelaporan ini.

6.2 Lingkungan

Rencana Manajemen Lingkungan ACCESS (EMP) terus dilaksanakan untuk memastikan bahwa Program memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang berkesinambungan dan mengurangi efek negatif bagi lingkungan sejalan dengan *Panduan Manajemen Lingkungan Program Bantuan Australia dan Kebijakan Lingkungan AusAID*.

Dari sisi program, semua mitra ACCESS diharapkan untuk mengatasi dampak lingkungan yang potensial sebagai bagian dari proposal anggaran mereka dan seberapa efektif dampak-dampak tersebut akan dikelola, menjadi kriteria di mana proposal tersebut dipertimbangkan. Jika proposal memiliki fokus pada lingkungan

tertentu, ACCESS mengikutsertkan spesialis eksternal untuk mengambil bagian dalam panel penilaian.

Salah satu focus area di mana ACCESS menargetkan pendanaan melalui program hibah adalah Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM) yang dipimpin oleh masyarakat dan Ketahanan Lingkungan. Tiga PGA untuk peninjauan dan perencanaan rencana aksi yang berfokus pada NRM sudah ditandatangani pada periode pelaporan ini, termasuk:

“Selama proses audit yang dilakukan AusAID baru-baru ini, Mr Umer Altaf, Auditor Senior Stirling Internasional menelaah rencana manajemen resiko CAHHF dan kami membahas langkah-langkah yang akan diambil memperbaruinya. Mr. Altaf telah meninjau contoh penipuan dan rencana manajemen resiko dari program bilateral AusAID lainnya, dan ia mendukung rencana ACCESS yang bagus dan mengatakan bahwa program-program bilateral lainnya bisa belajar dari itu”.
(Satoko Yikota, Institut Burnet)

- Peninjauan dan perencanaan pada rencana aksi tentang konservasi dan penggunaan sumber daya air di daerah tangkapan air Jeneberang oleh Lembaga Bumi Indonesia di Gowa.
- Peninjauan dan perencanaan untuk rencana aksi tentang konservasi lingkungan berbasis masyarakat dan ruang hijau oleh Lembaga LPMT di Kabupaten Takalar.
- Peninjauan dan perencanaan rencana aksi untuk meningkatkan partisipasi dan hubungan antara para stakeholder dalam pengelolaan sumber daya alam

secara berkelanjutan oleh Yayasan Bina Cempe di Dompu.

Setelah berhasil melaksanakan peninjauan pada periode pelaporan sebelumnya, ada empat PGA²³ yang telah ditandatangani pada periode ini untuk mendanai rencana aksi NRM yang berkesinambungan fokus pada perempuan dan kaum miskin. PGA ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kerusakan lingkungan, mengurangi kerusakan lingkungan alam melalui eksploitasi yang ceroboh, dan membangun kesejahteraan ekonomi lebih berkesinambungan melalui penggunaan sumber daya alam. Jumlah rencana aksi untuk NRM yang berkelanjutan menjadi 6.

6.3 Anti-Korupsi

ACCESS terus melaksanakan Rencana Peraturan terhadap Penyimpangan dan tindakan aksi korupsi sejalan dengan *Anti-Korupsi Kemitraan Australia Indonesia untuk Pengembangan Rencana 2008-2013 dan Penanganan Pertumbuhan dan Perkembangan Korupsi AusAID – Kebijakan Anti-korupsi tahun 2007*. Panduan prinsip transparansi dan akuntabilitas ACCESS telah diterapkan dalam operasional ACCESS sendiri, dengan adanya Buku Operasional Program dan Manual Manajemen Lapangan. Transparansi dan akuntabilitas juga secara aktif dipromosikan kepada mitra ACCESS, sebagaimana dibuktikan di dalam Manual Keuangan OMS sebagai penerima dana hibah, Panduan Keuangan untuk mitra strategis dan berbagai pelatihan dan sosialisasi bagi mitra ACCESS yang dilakukan sebagai bagian dari pendanaan program.

Program Koordinator selalu mengirimkan laporan mengenai Penyimpangan-penyimpangan Keuangan secara garis besar setiap bulan kepada Activity Manager AusAID mengenai langkah-langkah yang diambil dalam kasus potensial penipuan.

²³ KONSEPSI, PAKTA Sumba, Sintesa, dan Asosiasi Mareje Bonga – mengacu ke lampiran 6 untuk keterangan lebih lanjut.

Salah satu kasus penggelapan oleh Mitra ACCESS ditutup pada periode pelaporan ini setelah semua dana yang digelapkan telah berhasil ditemukan. Rencana Peraturan terhadap Penyimpangan ACCESS telah mendapat pengakuan sebagai contoh praktek terbaik. Seperti disebutkan sebelumnya Rencana Kontrol Penipuan telah diadopsi oleh program yang lain yang didanai oleh AusAID.

Audit Mitra Strategis diteruskan dalam periode pelaporan ini dengan dua tambahan audit terhadap *Task Notes* yang dikeluarkan dari PGA Mitra Strategis. Satu audit terhadap Proyek Mitra OMS telah dilakukan pada periode pelaporan ini dan juga dijadwalkan audit pada periode pelaporan berikutnya.

Tim keuangan ACCESS memberikan pelatihan keuangan kepada staf keuangan Mitra yang menandatangani PGA selama periode pelaporan, termasuk dua mitra di

Tabel 6: Pelatihan ACCSYS

ACCSYS Pelatihan Keuangan bulan Nov-Maret 2010			
Lokasi	Mitra	Laki-laki	Perempuan
Buton	2	3	4
Bima	5	2	3
Dompu	4	0	4
TTS	2	0	2
Kupang	7	0	7
Total	20	5	20

Sulawesi Tenggara, empat mitra di Lombok, dan dua mitra di Sumba. Selama sesi ini mitra sepenuhnya diberikan pengarahan tentang tanggung jawab mereka mengenai Kebijakan Penipuan AusAID dan ukuran-ukuran anti-korupsi ACCESS.

Tim Keuangan ACCESS terus menyediakan pelatihan bagi Mitra ACCESS terpilih dalam penggunaan paket akuntansi sederhana (ACCSYS 08) yang memungkinkan OMS untuk

melakukan pelaporan multi-donor (lihat tabel 6). Sistem ini diujicobakan dalam ACCESS Tahap I periode menunggu dan berhasil dilakukan di Sulawesi Selatan pada periode pelaporan sebelumnya. Sistem ini mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam praktek keuangan dan mencegah terjadinya pembukuan ganda yang umum terjadi dalam dalam organisasi-organisasi. Pelatihan ini dilakukan dengan staf keuangan Mitra dan Direktur Proyek.

6.4 Kemitraan

Kemitraan yang digariskan dalam Proyek AusAID Indonesia Strategi Proyek 2008-2013 dan sehubungan dengan program-program pengembangan kemitraan Australia bekerja sama dengan GOI untuk mendukung hasil pembangunan dan menjawab kebutuhan bangsa Indonesia dan konteks kebijakan dengan fleksibilitas. Hal ini dilakukan melalui:

- Membantu Indonesia menggunakan sistem dan sumber daya sendiri secara lebih efektif;
- Secara aktif berinteraksi dengan CS untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan tuntutan perbaikan; dan
- Penyelarasan donor untuk meningkatkan bantuan yang efektif.

Strategi pertama yang disorot adalah prinsip-prinsip AusAID mengenai kerangka interaksi tingkat kabupaten yang menyebutkan bahwa tepat *'Program dan kegiatan harus berguna dan mendukung sistem pembangunan pemerintah pada tingkat nasional dan kabupaten'*. Menyatakan lebih lanjut bahwa *'selama Indonesia berkembang, satu-satunya cara untuk menjamin keberlanjutan manfaat dari dalam penyediaan layanan adalah merancang cara-cara pengembangan kapasitas dan pelayanan yang dapat dicapai dalam keterbatasan anggaran pemerintah yaitu pemerintah akhirnya dapat menjalankan kegiatan sendiri dengan memiliki kapasitas*

dan sumber daya yang dibutuhkan'. ACCESS telah menjadi penolong dalam mengembangkan suatu proses perencanaan yang merupakan solusi potensial untuk

“Pemerintah tidak akan mampu bereaksi tanpa kerjasama dari semua aktor-aktor lain. Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia” (Bupati of Jeneponto)

penyatuan teknokratis, perencanaan politik dan penganggaran secara partisipatif terjadi dari tingkat desa ke atas. Lihat bagian 2.2.4 contoh-contoh bagaimana GOI, pemerintah propinsi dan kabupaten mengambil pendekatan ini dan bagaimana Pemerintah Daerah melakukan scaling-up dengan menggunakan anggaran mereka sendiri. Pendekatan ACCESS memberikan solusi praktis untuk mematuhi peraturan yang ada

dan juga dihargai oleh Pemerintah pada tingkat yang berbeda.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah telah dipertahankan oleh karena RPJMDes lima tahun memberikan kesempatan mengalokasikan anggaran secara lebih efektif. Dengan menggunakan RPJMdes 'satu desa, satu rencana' proses tahunan perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pembangunan ini disederhanakan oleh karena dokumen itu digunakan sebagai dasar untuk perumusan Tahunan dan untuk mengidentifikasi sumber daya untuk mengimplementasikan rencana dengan :

- Mengidentifikasi sumber daya masyarakat untuk melaksanakan aspek-aspek tertentu dari rencana;
- Menentukan prioritas yang akan dibiayai melalui ADD yang tersedia;
- Mengidentifikasi kegiatan tertentu yang akan dibiayai melalui program khusus termasuk PNPM; dan
- Memprioritaskan kegiatan (dari tingkat yang lebih tinggi) untuk diusulkan dalam MusrenbangKec.

Strategi kedua, yang mendukung strategi yang pertama, adalah untuk memastikan bahwa kedua-duanya pemerintah dan CS mengambil peran dan tanggungjawabnya dalam memberikan kontribusi pada proses pembangunan. Memastikan bahwa semua stakeholder dari Pemerintah Daerah, CS dan kelompok lain memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip suatu masyarakat yang benar-benar demokratis adalah landasan untuk peningkatan tata pemerintahan. Pelatihan bagi warga, pemimpin desa, dan pejabat pemerintah bermanfaat dalam jangka panjang karena orang yang berketerampilan akan tetap tersedia dan sistem-sistem dilembagakan dalam Pemerintah Daerah melalui peraturan daerah dan alokasi anggaran.

Akhirnya, ACCESS terus mencoba untuk berhubungan dengan para donor dan stakeholder pembangunan yang lain untuk mengoptimalkan sumber daya. Di tingkat lokal kami telah memprakarsai rapat dengan JICA, CIDA, PNPM dan program AusAID lainnya untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal.

7 Manajemen Resiko

Berdasarkan umpan balik dari tim provinsi dan laporan ulasan IPR, sejumlah resiko dan tindakan pengurangan resiko telah diidentifikasi pada Tabel 7. Hal ini akan dipertimbangkan untuk sisa APY2 dan menginformasikan perbaikan strategi dan kegiatan untuk APY3.

Tabel 7: Resiko-resiko yang teridentifikasi pada bulan Nov 2009-March 2010

Resiko	Potential Impact	Management Measure
--------	------------------	--------------------

Resiko	Potential Impact	Management Measure
Persaingan dalam kepentingan politik di Kabupaten Muna antara beberapa SKPD yang mendukung interaksi dengan ACCESS dan Bupati yang tidak begitu responsive.	<ul style="list-style-type: none"> Lambatnya kemajuan Proyek. 	<ul style="list-style-type: none"> Anggota staff dialokasikan sebagai sumber daya yang berdedikasi di kabupaten Muna untuk interaksi secara intensif.
Pemilihan di bulan Juni di sebagian besar kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"> Stakeholders akan mengalihkan perhatiannya dari kegiatan ACCESS yang terkait. Upaya untuk melibatkan ACCESS untuk kepentingan politik yang berbeda. 	<ul style="list-style-type: none"> Semua staff waspada terhadap resiko ini untuk dapat menghindari ke situasi kompromi. Prioritas yang tinggi untuk mengawasi manajemen.
Menyeimbangkan pengelolaan program yang lebih terdesentralisasi dengan tingkat kekeliruan yang diperlukan untuk memastikan proses-proses program dan prosedur yang diikuti.	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas hasil keluaran dan ketepatan waktu dalam pengiriman. 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat perjanjian operasional yang jelas. Menjelaskan unsur-unsur yang tidak dapat dirundingkan dalam proses dan prosedur program dengan staf. Mengintegrasikan kualitas untuk hasil –hasil program kunci ke dalam penilaian kinerja staf.
"Membatasi kesepakatan' kontrak dengan Mitra strategis (SP) membuktikan bahwa sangat memakan waktu dalam urusan administrasi karena kebutuhan akan CB dari SP.	<ul style="list-style-type: none"> Penundaan kontrak SP. Lebih banyak waktu yang diambil oleh STO CB dalam menyiapkan manajemen kontrak daripada pelaksanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Perjanjian sudah berjalan dengan AusAID untuk pengaturan kembali kontrak ke 'proses dana hibah' untuk SP lokal. Diteruskan ke penasehat tingkat Nasional dan Propinsi dalam system pembatasan perjanjian. Terus mengembangkan pendekatan kemitraan melalui komunikasi terbuka dan tinjauan bersama mengenai proses administrasi. Merekrut <i>Grant Officer</i> ketiga (diharapkan pada APY3) khusus untuk menangani administrasi kontrak dengan SP.
Interaksi yang terbatas dalam masalah keuangan di luar tahapan perencanaan desa.	<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya peluang untuk memperkuat sisi anggaran dan proses perencanaan pengembangan keuangan publik sehingga upaya pada sisi permintaan dapat dikurangi. 	<ul style="list-style-type: none"> Mitra ACCESS akan didorong dan didukung untuk berinteraksi dengan masalah keuangan daerah sebagai bagian dari rencana aksi mereka. ACCESS melakukan diskusi per kabupaten tentang kemungkinan mempunyai rencana aksi tambahan yang berhubungan dengan pembiayaan dan masalah

Resiko	Potential Impact	Management Measure
		anggaran terkait dengan lima daerah tematis yaitu pelayanan perencanaan dan penganggaran NRM, LED dan keadilan social.
FLA dapat kehilangan momentum jika anggota terikat dengan aktivitas lainnya (dibayar) dan anggota dianggap sebagai "elitas" atau peran mereka tidak jelas.	<ul style="list-style-type: none"> FLA tidak bisa bergerak melampaui pengembangan visi dan agenda dan / atau kehilangan momentum. 	<ul style="list-style-type: none"> ACCESS akan terus memfasilitasi dialog antara FLA tentang peran mereka, struktur dan tujuan. Mendukung FLA untuk fokus pada beberapa 'hasil awal' untuk membangun rasa prestasi.

8 Manajemen Program

Petunjuk Manajemen Lapangan dan Petunjuk Operasional Dana Hibah telah diperbarui selama periode pelaporan berdasarkan pengalaman pelaksanaan selama periode enam bulan sebelumnya.

Semua kontrak yang dibutuhkan dalam laporan ini (lihat lampiran 4) telah diserahkan kepada AusAID tepat waktu dengan revisi yang sangat minim.

Program manajemen terus menjadi responsif dan fleksibel untuk permintaan dari AusAID, mitra ACCESS dan para stakeholder lainnya.

8.1 Program Staf

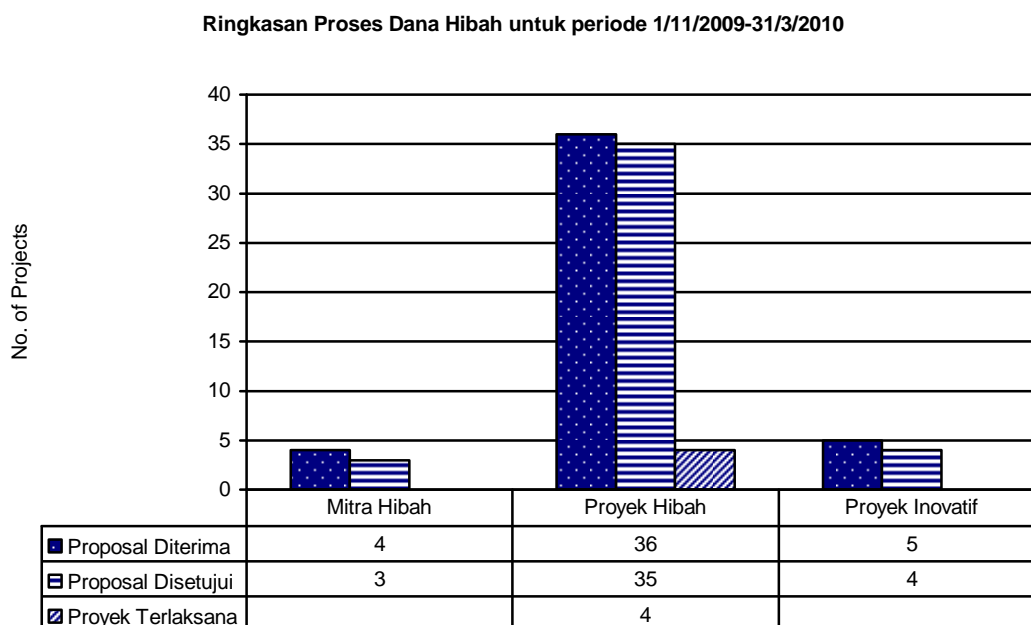
ACCESS saat ini memiliki 40 staf lokal yang terlibat, termasuk 14 staf yang berbasis di Bali dan 26 staf yang berbasis di tingkat provinsi. Petugas Program (PO) yang baru direkrut pada periode pelaporan untuk Sulsel setelah kematian tragis Murni Ismail pada bulan Desember 2009. PO sementara juga direkrut untuk Sumba sementara yang memegang jabatan sebagai PO sedang cuti hamil selama tiga bulan terhitung mulai Maret 2010.

Bruce Bailey, Penasehat Jangka Pendek (STA) MIS menyelesaikan masukan 24 hari di bulan Desember dan Maret untuk memperbarui dan merevisi database MIS ACCESS, ERSULA II. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan dan masukan yang diterima dari staf ACCESS selama Rapat Koordinasi dan Pembelajaran (CLM) bulan Desember, ERSULA telah dirubah untuk membuat ERSULA lebih mudah digunakan dan lancar. Pekerjaan tambahan masih diperlukan untuk melakukan konversi data dan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan revisi untuk PAMELS setelah kunjungan IPR. I Nyoman Oka melanjutkan peran STA dalam mendukung perencanaan dan penganggaran desa. Pekerjaan ini akan terus berlanjut ke periode pelaporan berikutnya. Chris Dureau terus memberikan masukan dan bantuan teknis kepada tim Pengembangan Masyarakat berbasis aset. Bantuan teknis juga digunakan selama periode pelaporan untuk ulasan sesama rekan lokal terhadap modul Alternatif Pendidikan untuk orang dewasa dan anak-anak sebagai salah satu produk Dana Hibah Inovatif yang didanai ACCESS.

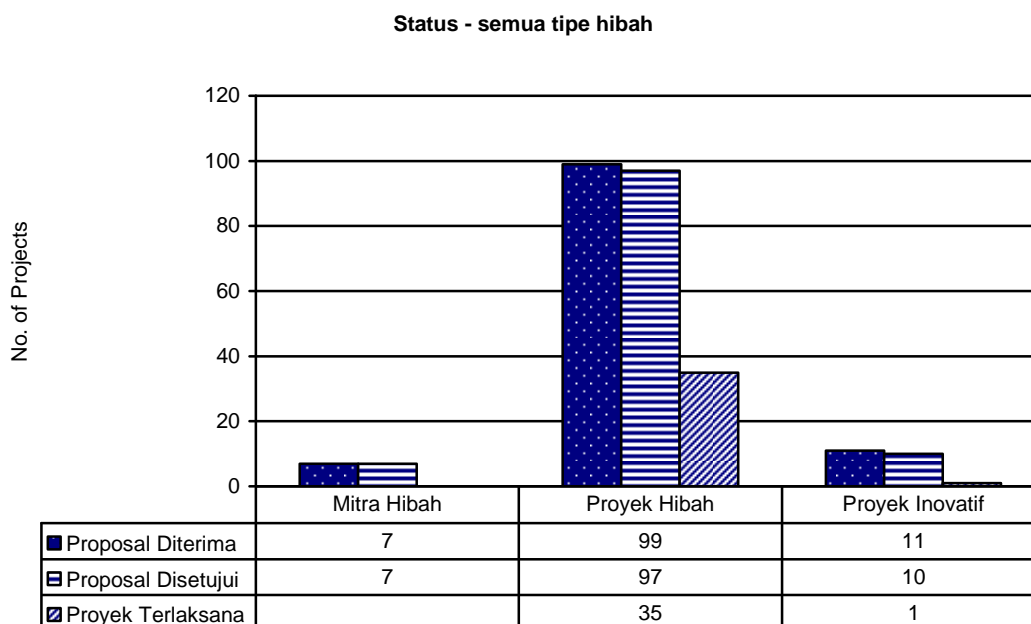
8.2 Manajemen Dana Hibah

8.2.1 Proses Hibah

Selama periode pelaporan, 45 proposal telah diterima dan 42 telah disetujui, dan empat proyek telah selesai. Angka 3 dan 4 memberikan rincian proses hibah menurut jenis hibah untuk periode pelaporan dan total sampai saat ini. Lampiran 5 berisi rincian lebih lanjut tentang semua usulan yang diterima, disetujui dan telah selesai selama periode pelaporan.



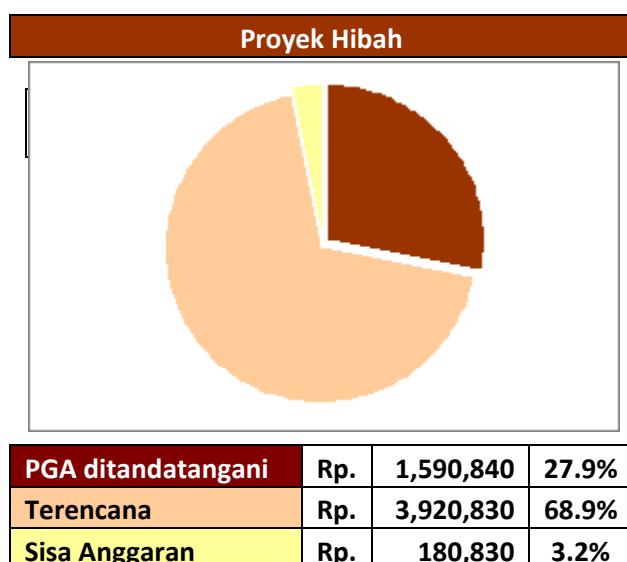
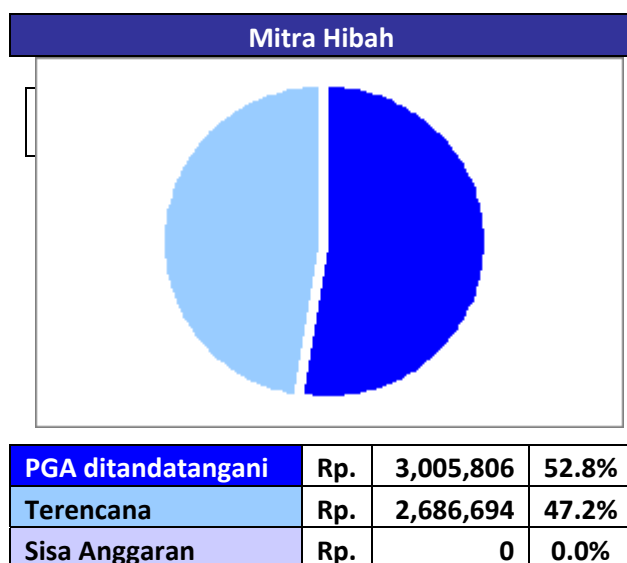
Gambar 2: Proses Dana Hibah Periode Pelaporan ini

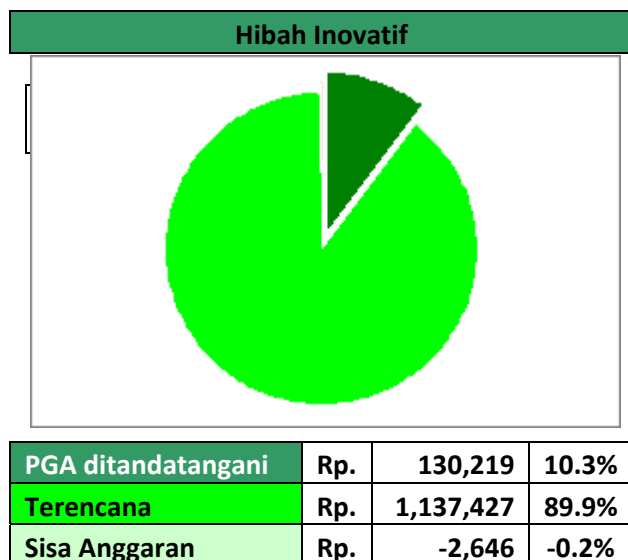


Gambar 3: Proses Dana Hibah sampai saat ini

8.2.2 Pengeluaran Hibah

Program berjalan sesuai dengan rencana dalam penggunaan dana sampai tahun 2013. Sampai saat ini 100% dari dana hibah untuk Mitra telah dialokasikan khusus topik CB yang dihasilkan dari Proses Tender. , 96,8% Dana Hibah Proyek telah dialokasikan berdasarkan PGA dan juga PGA yang dalam tahap perencanaan. Untuk dana hibah Inovatif, sementara dana belum secara khusus dialokasikan tetapi anggaran sudah disiapkan oleh kantor-kantor provinsi untuk sejumlah kegiatan yang telah teridentifikasi dan akan ditindaklanjuti pada APY3 dan APY4. Gambar 4 menguraikan rincian anggaran antara PGA yang sudah ditandatangani dan PGA yang direncanakan.





Gambar 4: Alokasi Dana terhadap Anggaran

Perkiraan pengeluaran Pencairan dana Hibah untuk periode enam bulan berikutnya terdapat dalam Lampiran 3.

Perlu dicatat bahwa akan ada dana hibah di bawah biaya anggaran pengeluaran terhadap total anggaran Rencana Tahunan periode pelaporan ini karena:

- Penundaan dalam mengajukan proposal Mitra ACCESS untuk mendapatkan persetujuan, yang telah menyebabkan keterlambatan dalam mengeluarkan PGA
- Ada keuntungan dari kenaikan kurs sebesar 17.78% sejak rencana anggaran tahunan yang telah diserahkan kepada AusAID pada bulan Maret 2009, secara efektif meningkatkan total dana yang tersedia dalam rupiah mencapai 17,78%.

Appendix 1: Glossary of Terms

ACCESS Partners	:	Local OMSs who share the values promoted by ACCESS and who are primarily focused on shifting power relations to create greater social and gender equity in local development impacts. Based on the results of the District Citizens Engagement Plan (PAK), these organisations will be committed to actively addressing the issues facing the district by engaging with individuals, citizens' organisations and their networks, with Local Government and with other parties interested in local democratic governance. ACCESS supports these organisations by creating space and providing opportunities to reflect, to learn, to act in order to improve performance. ACCESS negotiates directly with these organisations to determine the kinds of behaviour they want/need to influence externally and how they want to change internally in order to affect this change. ACCESS will support directly through organisational and individual capacity building and grants for activities that match Program criteria in line with its guiding principles.
OMS	:	Civil Society Organisations (OMSs) are organized groups or associations which are separate from both the state and the market, enjoy some autonomy in relations with the state and are formed (voluntarily) by members of society to protect and extend their interests, values or identities. Unless specified otherwise in this document, in the context of ACCESS OMSs include NGOs, CBOs and other member organisations.
District-wide	:	Includes village, sub-district and district level.
Grantee	:	An organisation or individual who receives a Partner or Project Grant Agreement from ACCESS, funded from the ACCESS Grant Fund Imprest Account. This includes recipients of Partner, Project, and Innovative Grants.
New districts	:	These are the additional eight districts that have been agreed to for Phase II and include Kabupaten Kupang and Kabupaten TTS (NTT), Kabupaten Bima and Kabupaten Dompu (NTB), Kabupaten Takalar and Kabupaten Gowa (Sulsel), Kota Bau Bau and Kabupaten Buton Utara (Sultra).
Old districts	:	These include the original target districts from Phase I: West and East Sumba (NTT); West and Central Lombok (NTB), Jeneponto and Bantaeng (Sulsel); Muna and Buton (Sultra).
Strategic Partners	:	Organisations with specialist expertise selected for their proven track record to assist with Program

implementation. They will work with ACCESS and its ACCESS Partners through providing technical support, training and mentoring to the ACCESS Partners to develop capacities, conduct research and baseline data and produce learning materials in support of the Program's overall objectives. They will also assist the ACCESS ACCESS Partners in accessing key networks and actors operating at the provincial and national levels.

Target districts : The 16 districts in which ACCESS has been mandated to work.

Ultimate Beneficiary Partners: The Ultimate Beneficiary Partners are those with whom our ACCESS Partners interact to bring about improved democratic governance, including citizens, particularly women and poor marginalized groups, and local and national governments.

Appendix 2: Progress Monitoring Matrix

Functional Area 1 Output: ACCESS is implementing and updating its systems and guidelines for effective resourcing and program administration		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
Program Operations Handbook (POH) and Program Strategic Framework updated annually to respond to environmental changes and lessons learned	Revision of FMM and POH	<i>Not planned this reporting period</i>
Usage of upgraded ACCESS Website	Monthly update of Ersula and website	Ersula and Website have been updated monthly
	Preparation and submission of Annual Plan	Draft Annual Plan submitted on the 31 March 2010
Quality reports to AusAID are delivered in a timely manner	Preparation and submission of monthly and 6-monthly reports	5 Monthly reports (Nov-March) all submitted by due date. Nov-March 6 monthly report submitted on 31 March.
Activities to promote good environmental practice internally and with partner OMSs		Provincial Coordinators continue to support ACCESS Environmental plan
Activities to promote HIV mainstreaming internally and with partner OMSs		HIV Mainstreaming workshop held 23-24 February
Number of grants issued by type		3 Partner PGAs issued 35 Project PGAs issued 4 Innovative PGAs issued
	Provincial and head office system audits	<i>Not planned this reporting period</i>
	Performance appraisal for all staff	<i>Not planned this reporting period</i>

Functional Area 2 Output: ACCESS is engaging with OMSs and Local Governments to implement the Program		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Identify key stakeholders (Local Government, OMSs, etc) and undertake stakeholder mapping for new districts	<i>Completed</i>
	Sharing learning from ACCESS experience in old districts for key actors in new districts	<i>Completed</i>
	Meetings of embryo FLA in new districts to deepen learning on issues related to local democratic governance	<i>Completed</i>
	Conduct PAK workshops in new districts	2 PAK workshops carried out in this period in 2 districts (Buton Utara and Kupang) with a total of 74 participants (42F; 31M) in November 2009.
FLA functioning in 16 districts with CS, Local Government and private sector participants	Regular meetings of FLA in old districts to share learning	12 Regular meeting have been carried out by FLA in old districts. Meeting topics included: Participatory planning and budgeting, District agenda, role of FLA engagement between civil society and Local Government, Advocacy for Village Budget Allocation, Role and function of <i>Posyandu</i> . The total number participant were 199 (69F; 130M).
16 PAK Plans developed in line with ACCESS values and frameworks and annually reviewed	Support FLA to finalise PAK in new districts	Provincial team provided support to FLA to finalise PAK through providing technical assistance. Eight PAK were finalized during this reporting period in the 8 new districts.
	Market results of PAK to other key actors to build support	Marketing of District Vision and Agenda on LDG had been done in all 8 new districts. The

Functional Area 2 Output: ACCESS is engaging with OMSs and Local Governments to implement the Program		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		total number of participant were 374 (152F; 122M).
	Annual review of PAK in old districts	Annual Review of PAK carried out in two old district (Jenepono and Bantaeng) with the total number participant 60 (27F; 33M). All other reviews are planned by the end of APY2.

Functional Area 3 Output: ACCESS is building the capacity of OMSs and their networks for LDG improvements		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Based on PAK conduct CB assessments and analyse capacity building requirements in old districts	CB assessments were carried out in the last reporting period. With the selection of the Strategic Partners a new assessment will be carried out in all 16 districts. This process has begun with the design of the assessment tool (March 2010) in a 3 day participatory workshop involving 5 ACCESS staff and 13 Strategic Partners (8F, 8M).
	Based on PAK conduct CB assessments and analyse CB requirements in new districts	<i>Not Planned this reporting period</i>
	Identify and select potential strategic partners	<i>Not planned this reporting period</i>
	Issue partner grant agreements	7 PGAs and 11 Task Notes were issued in this period based on the CB plan per district.
16 District Capacity Building Plans developed with local OMSs	Establish a CB plan per district in old and new districts	To be carried out next reporting period following the completion of the new assessment.
	Prepare guidelines, methods, and tools to support FA2, FA4, FA5 (PAK workshop with AI, OM for planning, OM for MEL, Reviewing Kabupaten agendas, Governance in cooperatives/ village economic organizations, etc).	Over this period, guidelines and tools have been developed including: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Finalization of the manual for facilitating the PAK proses; ▪ Guidelines for using outcome mapping framework in the development of monitoring and evaluation; and ▪ Guidelines for carrying out the assessment and action planning using outcome mapping.
Number and type of CB activities conducted	Implement CB activities in support of FA2, FA4, FA5	23 CB activities have been carried out by 5 Strategic Partners and 14 by ACCESS staff in

Functional Area 3 Output: ACCESS is building the capacity of OMSs and their networks for LDG improvements		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		<p>the areas of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CLAPP GSI ▪ Community Organizing ▪ Entrepreneurship ▪ Appreciative Inquiry and Strength based Approaches ▪ Citizens Report Cards ▪ Facilitation ▪ Participatory research ▪ Participatory Assessments and Outcome Mapping ▪ Financial management ▪ MEL
Number and % of male/female trainers/facilitators involved in workshops and training activities		49 trainers/facilitators (45% of F, 55% of M) involved in training activities undertaken by Strategic Partners and ACCESS during the reporting period.
Number of training days by gender		The 23 CB activities had a total of 660 training days for women and 667 for men.
Number of people with improved facilitation skills through ACCESS supported training		28 participants were trained in CLAPP GSI as trainers (14F and 14M) and 188 as CLAPP facilitators (100F and 88M) from reports of 9 activities out of the 11 carried out (2 reports are pending).
Satisfaction rating of participants in CB activities by gender		Overall satisfaction rating for all CB activities from 21 reports (out of 23 activities) 98% satisfaction rating for men and 97% satisfaction rating for women.
	Coaching and Mentoring to support Boundary Partners' CB activities	ACCESS staff provided ongoing coaching and mentoring support to ACCESS partners in all

Functional Area 3 Output: ACCESS is building the capacity of OMSs and their networks for LDG improvements		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		CB activities
	Identify possible opportunities in the FLA and PAK action plans where woman and youth at different level can engage more actively on issues of concern	Opportunities being identified through action plans
	Identify potential women and youth leaders and build their capacities	The study on women leaders is currently being finalised. This paper has provided good support to ACCESS in the development of strategies for the identification of potential women leaders and how to build capacities. A PGA has been signed with Gita Pertiwi for CB in Women's Leadership.
	Annual SP meeting post PAK	In December, all 13 Strategic Partners met with ACCESS field staff to discuss approaches and to define key TORs for CB activities (12F and 14M).

Functional Area 4 Output: ACCESS is supporting the planning and implementation of self directed development efforts		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Providing technical assistance on concept paper and assessment proposal writing (old district)	ACCESS staff supported the development of 48 Concept Papers. Ongoing TA was provided to 29 Partners by Provincial Teams on assessment and planning of action plans. Workshop on participatory assessment and outcome mapping were held for Partners in new districts, facilitated by Provincial team and TAT to assist partners in the OM framework.
Number of villages that using revised CLAPP process in each district ²⁴		324 villages
Number of local facilitators (male and female) trained to facilitate the revised CLAPP methodology in each district		430 village facilitators (207F and 223M) were recruited, coached and trained on CLAPP GSI. 176 from those numbers have facilitated the village participatory planning process using CLAPP GSI in their village.
	Providing technical assistance on concept paper and assessment proposal writing (new districts)	29 OMS's Partners in new district received direct intensive TA on assessment proposal writing by ACCESS staff.
	Providing local management and mentoring support (through ACCESS staff) to local OMSs in proposal preparation and appraisal processes	13 OMSs Partners received intensive mentoring in the proposal development process based on the OM planning workshops. Appraisals of project proposals were carried out in the field with participation from Partners, beneficiaries and other stakeholders. Each panel had one government official knowledgeable in the field, one ACCESS staff

²⁴ This indicator will be revised in the next review of PAMELS based on changes made to FA4 in the Annual Plan

Functional Area 4 Output: ACCESS is supporting the planning and implementation of self directed development efforts		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		and one local expert.
	Grant support for assessment and action planning to boundary partners to ensure that communities are involved in defining the goals, outcomes, and activities that will contribute to their empowerment	29 grants provided for assessments this period. Approximately 1,740 community members were involved in these assessment and planning processes.
	Provide support and technical assistance to boundary partners for project implementation to ensure that key values are being considered mainstreamed at all levels from beneficiaries to boundary partner	Provincial staff and the TATin Bali have been providing on-going TA to Partners in developing project proposals.
Number of beneficiaries in village level activities by gender and socio-economic status		Data not yet available. As programs are implemented this data will be reported in Partner progress reports and M&E data.
Number of grants for village activities issued this period		In this period 7 PGAs were issued for action plans bringing the total to date to 22 action plans.

Functional Area 4 Output: ACCESS is supporting the planning and implementation of self directed development efforts		
Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
Number and type of projects (by focus markers)		Of the 7 Action Plans approved in this period, 1 in improved public service delivery, 4 were in NRM and 1 in Planning and Budgeting, 2. For the Program to date the number and type of projects by Thematic areas as follows: <ul style="list-style-type: none"> ▪ OMS working on Participatory Planning and Budgeting = 9 PGAs (old district) ▪ OMS working on Improved Public Service Delivery = 4 PGAs (old district) <ul style="list-style-type: none"> ▪ OMS working on Local Economic Development = 4 PGAs (old district) ▪ OMS working on Sustainable Natural Resource Management = 5 PGAs (old district)
Project grants appraised and approved in timely manner		All Project proposals received during the reporting period (45) were appraised within month of receipt

Functional Area 5 Output:**ACCESS is promoting continuous learning and policy and practice change both internally and externally**

Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
Regular gender and poverty disaggregated data is accumulated and analysis is prepared and discussed with OMS and GOI stakeholder	Inputting data to ERSULA for Grant and CB Activities	Ersula updated on a monthly basis.
Changes in Program approaches and policies based on lessons learned	Review and revise guidelines on M&E and reporting for ACCESS Partners and staff	Guidelines on M&E and reporting for ACCESS Partners are being prepared. Will be completed next reporting period.
Activities to engage stakeholders in ACCESS M&E activities	Conduct participatory progress and outcome monitoring of grant funded projects on quarterly basis (phased across all partners)	2 MEL Workshops were held in in Buton (10F, 6M) and Muna (8F, 5M).
	Strengthen capacity of district stakeholder committees to analyse and review local processes and changes in governance practices and policies	1 Workshops on MEL for FLA in Buton attended by 17 participants (10F, 7M).
	Revise CDST	Currently under review
	Undertake monitoring on specific aspects of the CSI with ACCESS Partners and FLA (through SPs) in new districts	Due to the finalisation of overall CSI Results, monitoring on specific aspect of CSI in the new districts will be undertaken in the next reporting period.
Annual FLA review of PAK	Support FLA to conduct annual review of PAK in old and new districts	2 FLA's 3-day Annual Review of PAK for Bantaeng and Jeneponto. In Jeneponto 30 participants – 17M and 13F and in Bantaeng 30 participants – 16M and 14F.
Action research activities	Collaborate on one research program with an international/national organisation (involving local stakeholders)	Two exploratory researches have been conducted i.e. (1) Women Leadership Research by Kapal Perempuan, and (2) Village Owned Enterprises (BUMDes) Study by Institute of Research and Empowerment. The Study on the Implementation of RPJMDs in East Sumba by Koppesda is currently in progress.

Functional Area 5 Output:

ACCESS is promoting continuous learning and policy and practice change both internally and externally

Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
	Manage minimum of four Innovative Grants	5 proposals were received during this reporting period (1 proposal still being reviewed). 5 PGAs issued (one appraised during the previous reporting period).
Lessons generated from ACCESS M&E processes are shared with OMS partners, GOI stakeholders and donors	Develop district learning program for regular review and learning meetings/workshops with OMS and Local Government partners	<ul style="list-style-type: none"> • 24 FLA meetings held (12 in the old districts and 12 in the new districts) with total number of 410 participants (162F, 248M). • A shared learning meeting from partners in Buton and Muna to partners in Buton Utara on cooperative management, and from ACCESS staff to partners in Buton Utara on ODST.
	Produce 1 edition of ACCESS Bulletin and disseminate to district, provincial and national stakeholders and other donor programs	4,000 copies of the 3rd edition of ACCESS Bulletin have been produced.
	Produce two Good Practice Briefs and disseminate to district, provincial and national stakeholders and other donor programs	<ul style="list-style-type: none"> • The good practice manual on the alternative education for children and adults (PABAM) is in its final stage • A short film on Good Practices in the use of RPJM Desa in 13 villages in 5 Subdistricts of East Sumba.
	Identify opportunities for collaborating with PNPM at district level and share learning with national level PNPM	<ul style="list-style-type: none"> • ACCESS in West Lombok and PNPM MP have collaborated on RPJM Desa implementation • In Kupang, ACCESS and PNPM has agreed to develop synergy on RPJMDes training for village heads, BPD and KPM.
Activities to promote replication and scaling up	Identify opportunities to present ACCESS approaches and results through at least one national and four Provincial Government meetings (with non ACCESS districts where possible)	<ul style="list-style-type: none"> • .ACCESS presented at MOHA Evaluation meeting in Jakarta on 24 - 25 November 2009. • ACCESS' partner, Mitra Turatea, and Jenepono District Government presented at

Functional Area 5 Output:**ACCESS is promoting continuous learning and policy and practice change both internally and externally**

Output Indicator	Activities Planned Based On Annual Plan See highlighted boxes for This Reporting Period	Progress This Reporting Period
		the Coordinating Meeting on <i>Gerakan Nasional Pembangunan Kampung Kesejahteraan Rakyat 2010</i> in Jakarta, February 2010.
	Contribute as appropriate to the development and implementation of AusAID PNPM Strategy	ACCESS presented scale up activities in AusAID's Decentralisation Workshop on sub-national level engagement in December 2009.
	Conduct minimum of 2 presentations to other donors on ACCESS approaches and results	One of ACCESS' project partners (Mitra Turatea) presented its experience on participatory planning and social map in VSO's Workshop in Flores, February.
	Identify at least one opportunity to participate in an independent and external evaluation on democratic governance in Indonesia	ACCESS has been featured in a joint UNDP-SNV's publication "Assessing Gender Responsive Local Capacity Development in Indonesia" as a result of its participation in UNDP's assessment on gender and capacity development.

Appendix 3: Six monthly Funding Estimates

**SUMMARY OF DISBURSED & ESTIMATE EXPENDITURE
October 2009 - September 2010**

Rp8,000

PERIOD		GRANTS TYPE			TOTAL
MONTHS	SEMESTER	PARTNER GRANTS	PROJECT GRANTS	INNOVATIVE GRANTS	
Oct'09- Mar'10 <i>(disbursed)</i>	2	\$720,170	\$373,591	\$94,656	\$1,188,417
Apr'10- Sept'10 <i>(Estimate Expenditure)</i>	1	\$1,021,047	\$957,031	\$310,787	\$2,288,864
GRAND TOTAL		\$1,741,217	\$1,330,622	\$405,443	\$3,477,281

Appendix 4: Documents Produced this Reporting Period

The following reports and documents were produced during the reporting period Nov 2009-March 2010:

- Draft Annual Plan APY3
- Monthly Grant Reports (Nov 2009-March 2010) to AusAID and provincial and district government
- Financial Irregularities Table (Nov 2009-March 2010)
- ACCESS Phase II Bulletin (Edition 3)
- ACCESS Topical Fact Sheets and papers (as part of IPR Resource Kit)
 - ACCESS Strategic Approach Fact Sheet
 - GSI Fact Sheet
 - Sustainability and Exit Strategy Fact Sheet
 - MEL Fact Sheet
 - Soft Systems Approach Paper
 - Strengths Based Approach Paper
 - Supporting Participatory Development Paper– Unifying Planning Processes from Village Level Upwards
 - The Use of CSI in ACCESS Phase II
 - The Use of CLAPP-GSI in ACCESS Phase II
- ACCESS HIV Situational Assessment Reports²⁵
- Revised CLAPP-GSI module
- The Voice of Citizens – The Voice of Development: A film on RPJMDes in East Sumba²⁶
- Film of the PAK process in South Sulawesi
- Guidelines for PAK Facilitation
- Guidelines for Assessment and Planning using OM Framework
- Provided input to the IPR Draft Report

²⁵ Due for publication early April 2010

²⁶ Due for release April 2010

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
16/10/2009	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok Barat (Solidaritas Perempuan Mataram)	Suhaimi	Optimising the Role of the Community Centre in Promoting Citizen's Basic Rights and Improved Service Delivery in West Lombok	749.915.000
20/10/2009	Satu Visi Yayasan	Deby R. Kasuatu	Strengthen Local Potential for Poverty Alleviation of Village Communities in West Sumba	899.546.250
20/10/2009	Pengembangan Rakyat Indonesia Madani (PRIMA) Yayasan	Jafar	Improve the Participation of Citizens and Their Organisations in the Implementation of Basic Education in Buton District	894.055.000
21/10/2009	Bahtera Yayasan	Stefanus H. Segu	Village Planning and Budgeting as a Starting Point for Equitable Village Autonomy Based on the Principles of Local Democratic Governance	1.972.769.250
03/11/2009	Yayasan Kritik (Kelompok Kerja untuk Transparansi dan Partisipasi Publik)	La Ode Muammar Kadhafi	Assessment and Planning using Outcome Mapping to Design a Community Empowerment Program to Manage Village Development as an Entry Point for Local Village Autonomy in Muna	4.447.000
06/11/2009	Berugak Dese	Naspiah	Increase the Capacity of Village Facilitators and Health Cadre to Encourage Community Participation in Clean and Healthy Lifestyles as a Part of Local Democratic Governance	380.532.500
17/11/2009	Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI)	Rahmat Sabani	Strengthen the Access and Control of Civil Society Through Advocacy of Community Based Natural Resource Management at West Lombok	708.565.000
17/11/2009	YAKIIN (Yayasan Kreasi Insani Indonesia)	Hardiyanto	Appreciative District Meeting (DCEP): To Develop and Implement an Agenda for Participatory Village Planning and Budgeting in North Buton	37.577.000
04/12/2009	Pelintas Buton	Nasrun	Empowering Village Communities in Managing Development Programs as an Entry Point to Village Autonomy	1.196.995.000
16/12/2009	Yayasan Wali Ati (Yasalti)	Ninu Rambu W. Lodang	Citizen Empowerment for Local Democratic Governance Through Participatory Planning and Budgeting	849.890.000
19/01/2010	Yayasan Goa Center (YGC)	Darmawan	Assessment for Participatory Education that is Innovative and Based on Local Potential Towards Quality Education in Gowa District	5.000.000
19/01/2010	Yayasan Pendidikan Lingkungan (YPL)	A. Rais Fatta	Assessment to Develop an Action Plan for Program 'Increasing Community Participation in Law Enforcement and Services in Gowa District'	4.848.000
20/01/2010	Lembaga Bumi Indonesia (LBI)	Muhammad Kodri Tapa	Assessment and Development of an Action Plan on Conservation and Use of Water Resources in the Jeneberang Water Catchment Area	4.970.000
21/01/2010	Lembaga YBC Kabupaten Gowa	Zainuddin Daud	The Inclusion of the Community in the Development of the Health Sector in Gowa	4.977.500
21/01/2010	Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (LEMBARA)	Faisal Amir	Assessment and Planning for Mainstreaming the Rights of Women and Children	5.000.000
22/01/2010	Lembaga Abdi Masyarakat (LAM)	Suriati	Assessment and Planning for Action Plan on Community Based Environmental Conservation and Green Spaces and Clean and Healthy Living	4.995.000
22/01/2010	Lembaga LPMT Kabupaten Takalar	Awaluddin	Assessment and Planning for an Action Plan on Involvement of Women and the Poor in the Health Board and Advocacy for Improved Public Health Services	4.995.000
22/01/2010	Lembaga FIK-KSM Kabupaten Takalar	Nurlinda	Assessment and Planning for Action Plan on Improving Community Capacity, Gender Mainstreaming and Public Policy Towards More Participatory, Transparent and Accountable Development	5.200.000
22/01/2010	Lembaga YKM Kabupaten Gowa	Nurlia Ruma	Assessment and Planning for Action Plan in Strengthening the Economic Position of Women and Poor Through Self-Sustaining Community Economy	5.000.000
01/02/2010	PAKTA Sumba Yayasan	Amos Siwa Wunu	Sustainable Natural Resource Management Based on the Poor and Women	726.107.500
11/02/2010	Bina Potensi Desa (Sintesa) Yayasan	Syukri Rauf	Internalisation of principles of Local Democratic Governance in Sustainable Natural Resource Management and the development of the local village economy based on local assets in Buton District	732.500.000
16/02/2010	Perkumpulan Serabut (Sekolah Rakyat Butuni)	Syahrudin Samiun	Assessment and Planning using Outcome Mapping Approach in the design of a program to improve the participation of citizens in planning and budgeting in rural sub-districts in Bau-Bau City	4.800.000
24/02/2010	Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (YISA)	Abdul Haris	Assessment to develop Action plan for school committees and Children's organisations in 15 pilot schools (9 primary, 6 secondary) in subdistrict Wawo	5.000.000
24/02/2010	Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi Ekonomi Rakyat "Bangun Daya" (LP2DER Bangun Daya)	Ir. Bambang Yusuf	Assessment to develop an Action Plan for a program to strengthen the capacity of village community development cadre with the aim of encouraging democratic development	5.000.000
24/02/2010	Lembaga Studi Pengkajian Lingkungan (LESPEL)	Zulkarnain AS	Assessment to develop an Action Plan to strengthen planning and budgeting for village development that is participatory, transparent and accountable in an effort to encourage local democratic governance	5.000.000

24/02/2010	Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (LPMP) Dompu	Drs. Abdullah Mas'ud	in Dompu Social assessment for the development of an Action Plan for a program to strengthen citizens and their organisations in supporting the improvement of free education and health services in Woja Subdistrict, Dompu	5.000.000
Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
24/02/2010	Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSA) NTB	Yusuf HAD	Assessment and the development of an Action Plan for a program to advocate participatory budgetting that is gender and pro-poor sensitive	5.000.000
24/02/2010	Yayasan Bina Cempé (YBC)	Hadijatul Qubrah	Assessment to develop an participatory Action Plan using Outcome Mapping approach that improves participation and relations between stakeholders in managing natural resources in a sustainable manner	5.000.000
24/02/2010	Forum Masyarakat Tani "Paju Rasa" Kabupaten Bima	Hasan Kasim	Assessment to develop an Action plan for a program to improve the capacity of the Paju Rasa Farmer's Forum in Bima District	5.000.000
24/02/2010	Perkumpulan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD)	Saroso	Assessment to develop and Action Plan to strengthen village women's groups to improve public services and protection for women and children	5.000.000
24/02/2010	LSM Pelangi	Harun Anggoro	Assessment using outcome mapping approach to develop and Action Plan to strengthen the role and access to information for teenagers on reproductive health in an effort to reduce the spread of HIV/AIDS in Bau-Bau city	4.910.000
24/02/2010	Forum Peduli Perempuan Pedesaan Madapangga (FP3M)	Dahlia Jufri	Assessment and development of an Action Plan to improve the knowledge and skills of village women to reduce poverty levels in Ndano and Madawau village in Bima District	5.000.000
25/02/2010	Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Ina Fo'a Kupang	herlince Amekan	Assessment for the development of an Action Plan to increase the role of Jarpuk Ina Fo'a for the self-sustainability of women in Kupang district	5.000.000
25/02/2010	Bengkel " Advokasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung' (Bengkel APeK-NTT)	Vinsen Bureni	Assessment for an Action Plan for autonomous village development that is gender sensitive and participatory	5.000.000
25/02/2010	INCREASE (Institute of Cross Timor for Economic and Social Development)	Berti Soli Dima Dima Malingara	Assessment for Community Based Health Learning	5.000.000
25/02/2010	SDM Kupang	Paskalis Nai	Assessment for the development of an Action Plan to optimise the role of the community in participatory planning and budgeting in TTS District	5.000.000
25/02/2010	Sanggar Suara Perempuan	Ir Rambu Atanau Mella	Assessment for the development of an Action Plan to build local democratic governance through community based action on anti-violence against women	5.010.000
25/02/2010	Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR-NTT)	Ir Sarah Lerry Mboeik	Assessment for development of an Action Plan for program to increase the participation of citizens in village planning and budgeting	5.000.000
25/02/2010	LSM Lembayung - Asosiasi Mareje Bonga	Ali Wardana	Accelerate the Legality of Community Forest Management in Mareje Bonga Through Sustainable Forest Management that is Democratic and Improves the Livelihood of the Community	614.360.000
11/03/2010	Koslata	Ahmad Junaidi	Using OM Approach for the Assessment and Planning of a Program to Improve Capacity for Planning and Budgeting that is Pro-women and Pro-poor	5.000.000
11/03/2010	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASTI) dan Dewan Peduli Anggaran (DPA) NTB	Ely Mahmudah, Sag	Assessment for the Program to Strengthen the Intervention Strategy for Village Budget for 2010-2012 so it is More Pro-Poor and Pro-women in Central Lombok	4.540.000
			Projects: 60	Total
				17.581.425.500

Date	Partner Name	Contact	Project Name	Value
<u>Innovative Project</u>				
<i>Projects In Progress</i>				
28/07/2009	Sloka Institute	Anton Muhajir	Development of the ACCESS Bulletin as a Tool for Learning and Sharing Knowledge to Scale-up Program Impacts	173.675.000
01/09/2009	Veco Indonesia	Steff Deprez	Outcome Mapping Resource KIT	40.000.000
18/09/2009	Kapal Perempuan (Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan)	Yanti Muchtar	Assessment of Capacity Building Interventions Undertaken by ACCESS in Women's Leadership in South Sulawesi and NTB	201.685.000
16/10/2009	Tunas Alam Indonesia (SANTAI) Yayasan	Dian Aryani, SP	Alternative Child and Adult Education - an Alternative Critical Education	21.780.000
16/11/2009	Kaukus Peduli Perempuan Nusa Tenggara Barat (KPP – NTB)	Baiq. Ely Mahmudah	PKK Cadre as Actors for Local Democratic Governance	131.800.000
22/12/2009	Yayasan Goa Center (YGC)	Darmawan	Development of Media for Learning Activities Based on Results of ACCESS Phase II Activities	38.990.000
08/01/2010	Institute for Research and Empowerment (IRE)	Sutoro Eko	A Study on Village Economic Units (BumDes) as a Local Support for Village Autonomy	346.940.000
09/02/2010	Cahaya Nusantara Vision	Dra Suharti	Production of a photo novella	37.525.000
18/02/2010	KOPESDA (Lembaga Koordinasi Pengkajian Pengelolaan Sumberdaya Alam)	Cristian David, ST	Reflection and Sharing Lessons: Implementing RPJMDes - Building Enthusiasm for Development Actors in Promoting Local Democratic Governance	38.575.000
			Projects: 9	Total
				1.030.970.000